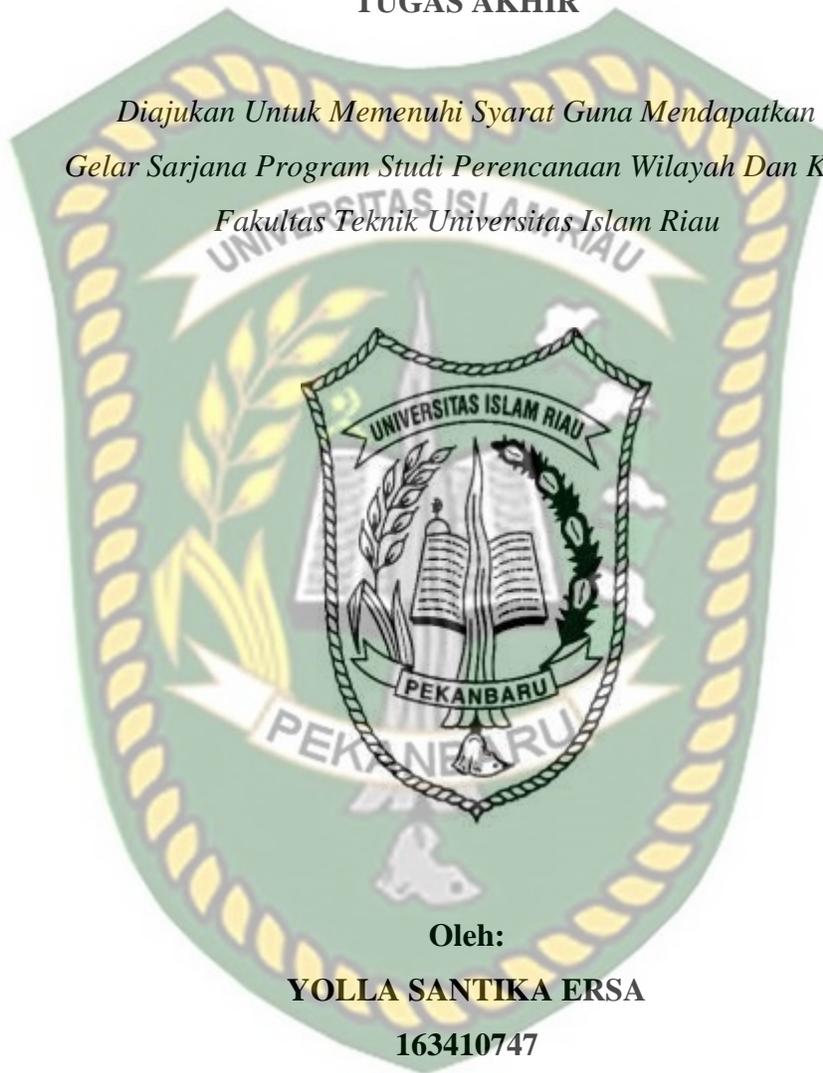


**KAJIAN PENGARUH JALAN TOL DUMAI-PEKANBARU TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KOTA DUMAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan
Gelara Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Oleh:

YOLLA SANTIKA ERSA

163410747

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

KAJIAN PENGARUH JALAN TOL DUMAI-PEKANBARU TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA DUMAI

YOLLA SANTIKA ERSA

163410747

**Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau**

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi disuatu daerah. Terdapat 1151 jumlah UMKM yang tersebar di Kota Dumai. Jalan tol Dumai-Pekanbaru merupakan infrastruktur yang memudahkan bagi pelaku UMKM dan menarik konsumen untuk datang sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM maupun pendapatan daerah Kota Dumai.

Penilitan ini bertujuan untuk melihat pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif kuantitatif. Untuk memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi lapangan dan kuesioner yang disebarakan kepada 119 responden di Kecamatan Dumai Selatan dengan menggunakan sample random sampling. Hasil dari kuesioner di olah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah (a) mengidentifikasi karakteristik UMKM, (b) mengidentifikasi kebijakan pemerintah Kota Dumai, (c) menganalisis pengaruh UMKM di Kecamatan Dumai Selatan karena adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru.

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM olahan makanan/minuman sebesar 54% dimana lebih banyak dibandingkan sektor UMKM lainnya. Berdasarkan kebijakan pemerintah, Kota Dumai tidak memiliki kebijakan khusus dari pemerintah Kota Dumai melainkan hanya mengikuti berdasarkan peraturan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan uji T pada variabel kegiatan pelaku UMKM, distribusi barang, waktu tempuh dan jumlah pengunjung yaitu 0,253, 0,462, 0,876 dan 0,819 dimana seluruh variabel memiliki nilai signifikan lebi besar dari 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kata Kunci : UMKM, Jalan Tol, Regresi Linear Berganda, Dumai

**THE EFFECT OF THE DUMAI-PEKANBARU TOLL ROAD ON MICRO
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN DUMAI CITY**

At :

YOLLA SANTIKA ERSA

163410747

**Urban and Regional Planing Urban Departemen of Faculty of Enginering, Islamic
University of Riau**

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the factors that influence economic development in an area. There are 1151 MSMEs spread across Dumai City. The Dumai-Pekanbaru toll road is an infrastructure that makes it easy for MSME actors and attracts consumers to come so that it can increase the income of MSME actors and the regional income of Dumai City.

This research aims to see the effect of the Dumai-Pekanbaru toll road on MSMEs in Dumai Selatan District. This study uses a quantitative qualitative descriptive method. To obtain data using data collection techniques, namely field observations and questionnaires distributed to 119 respondents in Dumai Selatan District using simple random sampling. The results of the questionnaire were processed using multiple linear regression analysis. The targets to be achieved are (a) identifying the characteristics of MSMEs, (b) identifying Dumai City government policies, (c) analyzing the influence of MSMEs in Dumai Selatan District due to the Dumai-Pekanbaru toll road.

This study shows that food/beverage processed MSMEs are 54%, which is more than other MSME sectors. Based on government policy, Dumai City does not have a special policy from the Dumai City government but only follows the regulations of the central government. Based on the results of multiple linear regression analysis with the T test on the variable activities of MSME actors, distribution of goods, travel time and number of visitors, namely 0.253, 0.462, 0.876 and 0.819 where all variables have a significant value greater than 0.05 which means there is no effect on business. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Keywords: MSMEs, Toll Roads, Multiple Linear Regression, Dumai

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami ucapkan kepada Alla Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dengan judul **“KAJIAN PENGARUH JALAN TOL DUMAI-PEKANBARU TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA DUMAI”**. Penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program starta I Program Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau. Kemudian juga penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dorongan dan bantuan terutama kepada :

1. Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dengan ucapan syukur Alhamdulillah karena telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Dr. Eng. Muslim, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
4. Ibu Puji Astuti, ST., MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

5. Bapak Muhammad Sofwan, ST., MT selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
6. Ibu Puji Astuti, ST., MT selaku dosen pembimbing yang berbagi ilmu dan memberikan nasehat demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
7. Ayahanda Alam Sawir, Ibunda Ermida dan keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungannya.
8. Saudara kandung Yolly Santika Ersya dan Viona Ersya yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya dan memberikan semangat serta doanya yang selalu ikut membantu saat survei pengumpulan data di lapangan tanpa mengeluh.
9. Sahabat-sahabat saya yang sangat berarti yaitu Chairun nissa, Samira Kesumawati Harahap, Tio Nur Rizky Nurul Ayu Fadilla, Sakinah Setiawani, Nurbaiti, Aninda pratiwi dan teman-teman saya yang bergabung di Eiso yang selalu memberikan dukungannya dan membantu dalam setiap kesusahan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 16 C Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam proses perkuliahan hingga membantu dalam proses pembuatan skripsi.
11. Tidak lupa berterimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan sabar dalam penyusunan tugas akhir ini.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan awal ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan disini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas budi baik yang telah dilakukan. Walaupun demikian dalam tugas akhir ini peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengarapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tugas akhir.

Dari penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu di bidang perencanaan. Dalam penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Hal ini karena dipengaruhi dengan pengalaman serta ilmu yang penulis miliki.

Demikian dengan selesainya laporan ini penulis mengharpkan semoga laporan tugas akhir dapat berguna dan bermanfaat.

Pekanbaru, Januari 2022

Yolla Santika Ersa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Hipotesis	8
1.4 Tujuan dan Sasaran.....	9
1.4.1 Tujuan	9
1.4.2 Sasaran	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Ruang Lingkup.....	10
1.6.1 Ruang Lingkup Materi.....	11
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	12

1.7	Kerangka pemikiran Studi	15
BAB II TINJAUAN TEORI.....		18
2.1	Perdagangan Dalam Perspektif Islam	18
2.2	Definisi Jalan Tol.....	19
2.3	Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	21
2.3.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.3.2	Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23
2.3.3	Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	24
2.3.4	Hambatan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25
2.4	Dampak Ekonomi Jalan Tol Terhadap UMKM.....	26
2.4.1	Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Daerah	28
2.4.2	Pengaruh UMKM terhadap Aspek Ekonomi	29
2.4.2.1	Tingkat Pendapatan	30
2.5	Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
2.5.1	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	32
2.6	Sintesa teori.....	44
2.7	Penelitian Terdahulu	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1 Pendekatan Penelitian	54
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data	55
3.2.1 Data Primer	55
3.2.2 Data Sekunder	56
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
3.4 Metode Pengumpulan Data	57
3.4.1 Data Primer	57
3.4.2 Data Sekunder	60
3.5 Tahap Penelitian.....	61
3.5.1 Tahap Persiapan.....	61
3.5.2 Tahap Kompilasi Data	62
3.5.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	62
3.6 Populasi dan Sampel	63
3.6.1 Populasi.....	63
3.6.2 Sampel.....	64
3.6.3 Informan Penelitian.....	68
3.7 Teknik Analisis	69

3.8	Analisis Regresi Linear Berganda	70
3.8.2	Uji Hipotesis	72
3.9	Variabel Penelitian.....	76
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		78
4.1.1	Luas dan Letak Wilayah	78
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Dumai Selatan.....	79
4.2.1	Letak dan Administrasi Kecamatan Dumai Selatan	79
4.2.2	Kondisi Demografi.....	80
4.3	Sarana dan Prasarana Kecamatan Dumai Selatan.....	81
4.3.1	Kondisi Pendidikan.....	81
4.3.2	Kesehatan	82
4.3.3	Tempat Peribadahan.....	83
4.3	Gambaran Umum Jalan Tol Dumai-Pekanbaru	84
4.3.1	Sejarah singkat Utama Karya Infrastruktur	84
4.3.2	Visi dan Misi PT. Utama Karya Infrastuktur.....	87
4.3.3	Tujuan dan Manfaat Jalan Tol	87
4.4	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai	88
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		92

5.1	Identifikasi Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	92
5.1.1	Usaha Mikro.....	97
5.1.2	Usaha Kecil.....	100
5.1.3	Usaha Menengah.....	102
5.2	Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	104
5.3	Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan.....	106
5.3.1	Fungsi Pelayanan Kota	106
5.3.1.1	Kegiatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (X1.1)	106
5.3.1.2	Distribusi Barang (X1.2)	108
5.3.2	Panjang Jalan Tol (X2)	109
5.3.2.1	Waktu Tempuh (X2.1).....	109
5.3.2.2	Jumlah Pengunjung (X2.2).....	110
5.3.3	Analisis Regresi Linear Berganda	111
BAB VIPENUTUP		118
6.1	Kesimpulan	118
6.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		121
Lampiran I Dokumentasi Penyebaran Kuesioner dan Wawancara		126

Lampiran 2 Lembar Kuesioner 127

Lampiran 3 Hasil Wawancara..... 130

Lampiran 4 Hasil SPSS 131



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFAR TABEL

Tabel 2.1 Sintesa Teori	44
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Uraian Waktu Pelaksanaan Penelitian	57
Tabel 3.2 Jumlah UMKM di Kota Dumai	66
Tabel 3.3 Data informan yang diperlukan	69
Tabel 3.4 Variabel Penelitian.....	76
Tabel 3.5 Desain Survey	77
Tabel 4.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Kota Dumai.....	79
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Dumai Selatan, 2019	81
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Dumai Selatan	82
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Dumai Selatan 2019	83
Tabel 4.5 Jumlah Tempat peribadahan di Kecamatan Dumai Selatan 2019	83
Tabel 5.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan.....	92
Tabel 5.2 Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai	93
Tabel 5.3 Umur Responden	94
Tabel 5.4 Tingkat Pendidikan Responden	95
Tabel 5.5 Pendapatan Responden	96
Tabel 5.6 Lama Usaha Respodonden.....	97

Tabel 5.7 Jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Dumai Selatan	98
Tabel 5.8 Jumlah Usaha Kecil di Kecamatan Dumai Selatan.....	100
Tabel 5.9 Jumlah Usaha Menengah di Kecamatan Dumai Selatan	102
Tabel 5.10 Penilaian Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekabaru Terhadap Kegiatan Pelaku UMKM.....	107
Tabel 5.11 Hasil Penilaian Pengaruh Jalan Tol Terhadap Distribusi Barang.....	108
Tabel 5.12 Hasil Penilaian Pengaruh Jalan Tol Terhadap Waktu Tempuh	110
Tabel 5.14 Hasil Analisa Regresi Linear Berganda.....	112
Tabel 5.15 Tabel Hasil Uji T	113
Tabel 5.16 Hasil Uji F.....	115
Tabel 5.17 Rekapitulasi Hasil Regresi Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru	117
Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Dumai Selatan.....	14
Gambar 1.3. Kerangka Berfikir.....	15
Gambar 4.1 Kondisi Jalan Tol Dumai-Pekanbaru	86
Gambar 4.2 Kondisi UMKM Kecamatan Dumai Selatan.....	91
Gambar 5.2 Sebaran Usaha Mikro.....	99
Gambar 5.2 Sebaran Usaha Kecil	101
Gambar 5.3 Sebaran Usaha Menengah.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebuah wilayah merupakan gambaran perencanaan kecil dari sebuah perencanaan nasional. Hal ini menyangkut pada bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dikembangkan yang tujuannya akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah. Di dalam sebuah wilayah terdapat berbagai unsur pembangunan yang dapat digerakan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Perencanaan sebuah wilayah dapat ditinjau dari berbagai pendekatan. Perencanaan wilayah merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas, baik ditinjau dari ruang maupun dari aktivitas yang berjalan pada ruang tersebut. Sebuah wilayah dapat diukur dari keluasan kecil, sedang dan besar namun tetap memiliki unsur pembangunan yang dapat dikembangkan. Keluasan ini tidak didasarkan pada keluasan administrasi pemerintahan tetapi pada keluasan di mana suatu potensi unsur kelompok.

Sebuah wilayah terdiri dari beberapa wilayah administrasi pemerintahan. Atas dasar inilah mengapa diperlukan kerjasama antar pemerintah seperti kerjasama anatar beberapa pemerintah kabupaten dan kota, yang saling memiliki unsur pembangunan yang sama atau yang saling memperkuat. Sebuah perencanaan adalah sebuah upaya sadar yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan yang mempunyai tujuan. Implementasi perencanaan diharapkan berjalan secara efisien dan efektif. Tanpa perencanaan, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai secara

maksimal pembangunan menjadi tidak efisien. Itulah sebabnya, mengapa suatu kegiatan harus direncanakan sebelum dilaksanakan. Secara lebih terfokus disebutkan bahwa perencanaan adalah sebuah upaya yang disusun secara sadar untuk memecahkan masalah yang dihadapi masa kini dan masa mendatang yang dikendalikan secara bertahap dalam jangka panjang dan dilakukan secara sistematis, melalui pengkajian skala prioritas. Sebuah perencanaan akan memberi arah pelaksanaan pembangunan dan pemaksimalan penggunaan unsur pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan secara maksimal (Miraza, 2005)

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan dari perencanaan wilayah yaitu dibangun suatu usaha yang terencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Jaringan jalan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu pembangunan. Jalan berperan untuk pemindahan barang dan manusia dari satu tempat ketempat lainnya sehingga diperlukan jalan yang memadai dan lebih mengedepankan kecepatan. Jalan tol merupakan jalan alternatif untuk mempercepat sarana transportasi, perkembangan industri pariwisata, menunjang pertumbuhan dan percepatan proses ekonomi yang kerap terhambat karena kendala transportasi yang kerap terjadi kemacetan akibat beberapa faktor. Salah satu yang terkena pengaruh dengan keberadaan jalan tol adalah pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan menciptakan terjadinya perubahan kondisi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan sesuatu keharusan bagi suatu negara, sekalipun negara tersebut sudah dalam keadaan makmur. Bagaimanapun juga tingkat kemakmuran ini harus ditingkatkan, minimal dipertahankan, untuk itu pembangunan

ekonomi lebih banyak ditekankan pada kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Hal ini berbeda dengan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang yang pada umumnya menekankan pada pembangunan secara fisik, seperti pembangunan jalan tol pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya pembangunan jalan tol dapat memberikan dampak bagi ekonomi salah satunya yaitu meningkatkan UMKM masyarakat (Hasan dan Azis, 2018).

Jalan tol Dumai-Pekanbaru adalah salah satu ruas jalan yang baru saja terselesaikan oleh pemerintah. Jalan tol ini berada di Provinsi Riau tepatnya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten siak dan Kota Pekanbaru. Jalan tol Dumai-Pekanbaru menghubungkan koridor-koridor ekonomi utama di Provinsi Riau antara lain Dumai-Duri-Kandis-Patapahan-Minas-Pekanbaru. Jalan tol Dumai-Pekanbaru merupakan salah satu segmen dari proyek tol Trans Sumatera yang berguna untuk memperlancar jarak tempuh yang lebih dekat. Pada pembangunannya, ruas jalan tol Dumai-Pekanbaru memiliki total panjang 131,48 km yang terbagi menjadi 6 seksi. Seksi 1 terdapat pada ruas Pekanbaru-Minas dengan panjang 9,2 km, seksi 2 terdapat pada ruas Minas-Petapahan sepanjang 23,6 km, seksi 3 Petapahan-Kandis Utara dengan panjang 17,45 km, seksi 4 Kandis Utara-Duri Selatan sepanjang 28,95 km, seksi 5 Duri Selatan-Duri Utara sepanjang 27,23 km, dan seksi 6 Duri Utara-Dumai sepanjang 25,05 km. Tol ini dilengkapi oleh 7 gerbang tol dan 5 pasang tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau *rest area*. TIP terbagi menjadi 2 tipe yakni tipe A yang terletak di km 14,5, km 45, dan km 82, sedangkan tipe B terletak di km 64 dan km 13 (arah Pekanbaru) (PT. Hutamakarya).

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Riau. Dumai memiliki Pelabuhan Udara Pinang Kampai yang terletak berdekatan dengan komplek perumahan PT. (*Caltex Pacific Indonesia*). Disamping akses udara Kota Dumai memiliki keunggulan sebagai salah satu Kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut. Dumai berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang dikelola oleh PELINDO dan beberapa pelabuhan rakyat. Pelabuhan Dumai dibangun untuk kegiatan ekspor impor begitu juga para penumpang yang ingin ke Malaka-Malaysia. Kota Dumai sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional seperti halnya Pekanbaru. Potensi luas wilayah yang besar, kekayaan SDA dan letak strategis dapat dijadikan modal utama didalam pembangunan dan memajukan Kota Dumai dan Provinsi Riau.

Sebagai pintu gerbang pelayanan internasional, Kota Dumai mampu berkembang menjadi pusat pelayanan jasa perdagangan. Kota Dumai memiliki posisi strategis yang dapat berpotensi menjadi pusat koleksi barang dan jasa dari wilayah daerah-pengaruhnya (*hinterland*) dan sekaligus menjadi pusat distribusi barang dan jasa. Kota Dumai berada dalam simpul transportasi nasional. Kota Dumai mempunyai daerah pengaruh tidak hanya kawasan di sekitar Kota Dumai tetapi juga dapat melayani koridor jalan Lintas Timur Sumatera. Jalur darat yang menghubungkan Dumai-Pekanbaru telah siap dilengkapi dengan prasarana berupa jalan tol baru, mengingat pentingnya peranan Kota Dumai khususnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Jalur pelayanan angkutan regional darat saat ini melayani hubungan

antara Dumai-Pekanbaru dengan kota-kota lain di Provinsi Riau, serta kota-kota lain di luar provinsi (pergerakan antar provinsi).

Jalan Tol Dumai-Pekanbaru memberikan pengaruh terhadap destinasi wisata salah satu wisata yang banyak dikunjungi adalah wisata pantai yang ada di Pulau rupert. Tidak hanya meramaikan pariwisata ke Pulau Rupert, tetapi juga berdampak baik bagi angka kunjungan wisata ke Kota Dumai, kota pelabuhan yang memiliki 13 pantai yang di kelola masyarakat dan satu diantaranya oleh Pemerintah Kota. Selain itu Ujung utara tol akan mempermudah akses menuju pelabuhan Bandar Sri Junjungan di Kota Dumai. Dumai sendiri menjadi pintu masuk para pedagang melalui selat Melaka. Negara Indonesia dan Malaysia saat ini terus melakukan berbagai persiapan untuk pembukaan rute *roll on roll off* (RoRo) Dumai-Melaka. Pembukaan ini dinilai dapat merangsang pergerakan barang dan membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebab melalui pelabuhan ini dapat mempermudah pergerakan area kendaraan pribadi dan kendaraan komersial lainnya.

Kecamatan Dumai Selatan merupakan salah satu kecamatan termuda di Kota Dumai dengan luas daratan 73,50 km². Letak kecamatan Dumai Selatan tepat berada di tengah Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Bukit Datuk. Berdasarkan data dinas Koperasi Kota Dumai pada tahun 2020 UMKM yang ada di Kota Dumai sebanyak 1151 UMKM yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai dimana ada 9 sektor usaha yaitu kerajinan, olahan makanan/minuman, perikanan, pertanian perkebunan dan kehutanan, peternakan, perdagangan, jasa, inovatif dan

kreatif, dan koneksi. Dimana jumlah UMKM yang tersebar di 7 kecamatan Kota Dumai yaitu pada Kecamatan Bukit Kapur memiliki jumlah UMKM sebanyak 161, Medang Kampai memiliki 160 UMKM, Kecamatan Dumai Timur memiliki 174 UMKM, Kecamatan Dumai Selatan memiliki 170 UMKM, Kecamatan Dumai Kota memiliki 158 UMKM, Kecamatan Dumai Barat memiliki 161 UMKM dan Kecamatan Sungai Sembilan memiliki 167 UMKM. Berdasarkan data tersebut Kecamatan Dumai Selatan memiliki jumlah UMKM terbanyak kedua setelah Kecamatan Dumai Timur. Namun pada Kecamatan Dumai Selatan memiliki UMKM yang menjadi ciri khas Kota Dumai yaitu terdapat oleh-oleh keripik ubi kayu khas Kota Dumai yang berada hampir di sepanjang Jalan Diponegoro Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan yang banyak dinikmati oleh masyarakat setempat maupun pendatang. Meskipun tidak dilalui oleh jalan tol namun, Kecamatan Dumai Selatan yang berada di tengah Kota Dumai sering di kunjungi oleh masyarakat yang berkunjung ke Kota Dumai baik membeli oleh-oleh khas Kota Dumai atau yang lainnya. Dengan adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru ini maka dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli oleh-oleh khas Kota Dumai tersebut.

Keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru ini sangat berperan penting selain untuk mempersingkat waktu perjalanan menuju kota tujuan, dengan adanya jalan tol ini dapat meningkatkan perkembangan wilayah dan ekonomi di Kota Dumai khususnya pengaruh bagi UMKM Kota Dumai.

1.2 Rumusan Masalah

Jalan tol Dumai-Pekanbaru merupakan suatu pembangunan infrastruktur yang dilakukan bertujuan untuk memperlancar jarak tempuh yang lebih dekat. Selain itu juga jalan tol ini dapat mempermudah pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu jalan tol Dumai-Pekanbaru juga dapat berpengaruh terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Kecamatan Dumai Selatan memiliki 5 sektor UMKM. UMKM yang paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan terdapat pada sektor olahan makanan/minuman terutama usaha oleh-oleh keripik ubi kayu khas Kota Dumai. Namun pada saat ini usaha oleh-oleh keripik ubi kayu ini yang dapat berkembang hingga ke luar kota tetapi pada UMKM yang lainnya masih belum berjalan dengan lancar dan masih kurangnya peminat.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Dumai Selatan salah satunya adalah usaha oleh-oleh keripik ubi kayu khas Kota Dumai yang diversifikasi diantaranya keripik cabe dan keripik biasa (klasik). Dengan adanya jalan tol ini dapat meningkatkan penjualan baik karena pengunjung yang datang ke Kota Dumai ataupun distribusi penjualan keluar kota yang kini semakin cepat sehingga produk bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Ini dapat berpengaruh meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Dengan mengingkatnya penjualan tersebut maka dapat juga memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah Kota Dumai. Selain itu hal ini juga dapat berpengaruh untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat Kecamatan Dumai Selatan dan dapat memasarkan produknya ke luar kota dan juga

untuk UMKM lainnya yang belum berkembang hal ini dapat menjadi peluang untuk lebih mengembangkan usahanya.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Dumai Selatan memiliki UMKM dengan beberapa sektor. Sektor yang paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan yaitu sektor olahan makanan/minuman. Berbagai kendala dan permasalahan banyak dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya salah satunya yaitu pada UMKM pangan olahan. Sebagian besar UMKM pangan olahan yang wajib memiliki nomor izin edar MD BPOM di Dumai masih memiliki kendala dalam hal minimnya informasi terkait dengan perizinan, sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan tentang tahapan sertifikasi produk. Selain itu beberapa UMKM juga memiliki kendala seperti kurang optimalnya upaya pemerintah untuk promosi sehingga kurangnya minat masyarakat, selain itu kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM dapat menjadi faktor penghambat berkembangnya UMKM tersebut. Oleh karena itu strategi ini diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang hingga ke luar Kota Dumai.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai pertanyaan yaitu “Bagaimana pengaruh UMKM Kota Dumai di Kecamatan Dumai Selatan karena adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru?”

1.3 Hipotesis

Penelitian ini dibatasi hanya satu hipotesa. Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan

dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Adapun hipotesa yang akan diteliti adalah:

H1 : Jalan Tol Dumai-Pekanbaru berpengaruh terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

H0 : Jalan Tol Dumai-Pekanbaru tidak berpengaruh terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM Kota Dumai.

1.4.2 Sasaran

Untuk mengetahui sasaran penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian dan sasaran yang paling utama dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik UMKM Kota Dumai di Kecamatan Dumai Selatan.
2. Mengidentifikasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai terhadap UMKM.
3. Menganalisis pengaruh UMKM di Kecamatan Dumai Selatan karena adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi akademis, dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan koleksi data serta referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka penelitian selanjutnya
- b. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM Kota Dumai.
- c. Bagi masyarakat agar dapat memberikan pemahaman terkait pengaruh keberadaan jalur tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM Kota Dumai baik pengaruh positif maupun pengaruh secara negatif.
- d. Bagi peneliti agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk menilai dan melihat banyak hal yang bisa di pelajari dari penelitian yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi lokal penduduk Kecamatan Dumai Selatan berupa UMKM dan memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan, penulisan dan menyusun hasil penelitian.

1.6 Ruang Lingkup

Pada penelitian tugas akhir ini ruang lingkup penelitian terdiri dari dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah yang akan dipaparkan pada sub bab berikut ini :

1.6.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah terkait dengan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dilaksanakan PT Utama Karya (persero), telah memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian masyarakat Pulau Andalas. Begitu pula halnya dengan warga yang tinggal di Bumi Lancang Kuning, manfaat jalan bebas hambatan ini juga ikut dirasakan usai dibukanya ruas tol Pekanbaru-Dumai (permai). Terdapat dua sektor ekonomi yang berdampak karena adanya jalan tol ini yaitu pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Pekanbaru menyatakan karena adanya jalan tol penjualan oleh-oleh terus membaik. Salah satunya didorong kemudahan pengiriman produk dari Pekanbaru ke Dumai atau sebaliknya, sehingga omset terus bertambah dan distribusi barang semakin cepat tanpa harus menginap seperti sebelum dibukanya jalan tol. Kemudian disokong ramainya jumlah masyarakat yang berwisata antar dua daerah, dan tentunya berbelanja makanan olahan serta buah tangan yang menjadi khas daerah untuk dibawa pulang ke rumah. Adapun ruang lingkup materi yang diteliti adalah sebagai berikut :

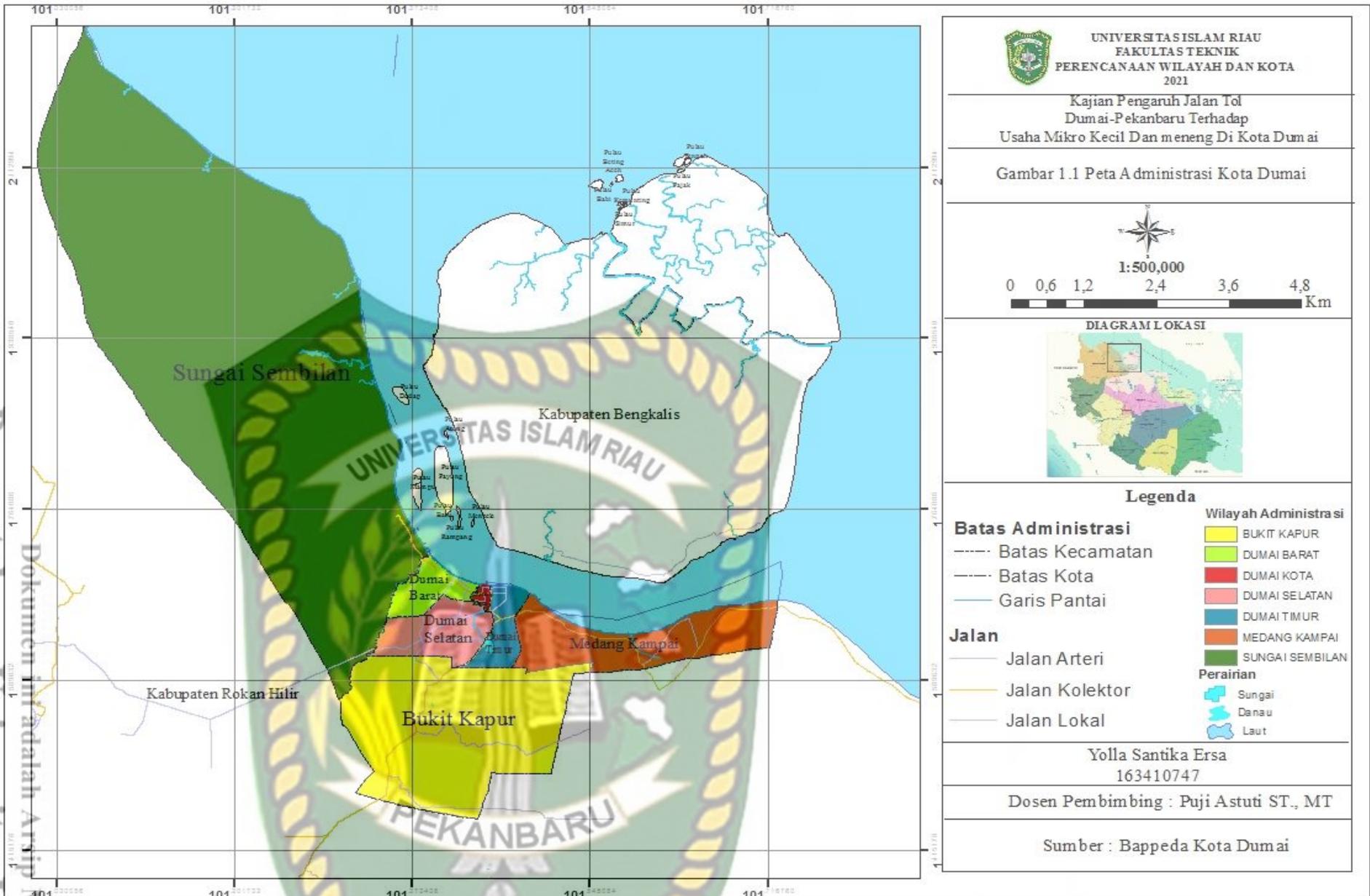
1. Dalam mengidentifikasi karakteristik UMKM Kota Dumai di Kecamatan Dumai Selatan menggunakan analisis deskriptif, dimana analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor-sektor UMKM apa saja yang terdapat di Kecamatan Dumai Selatan.

2. Dalam mengidentifikasi kebijakan bagi UMKM Kota Dumai menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini melihat dari data primer yang didapat dari instansi terkait untuk mengetahui kebijakan pemerintah bagi UMKM di Kota Dumai.
3. Dalam menganalisis pengaruh karena adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM yang berada di Kecamatan Dumai Selatan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh apa saja yang ditimbulkan bagi UMKM Kecamatan Dumai Selatan karena adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru.

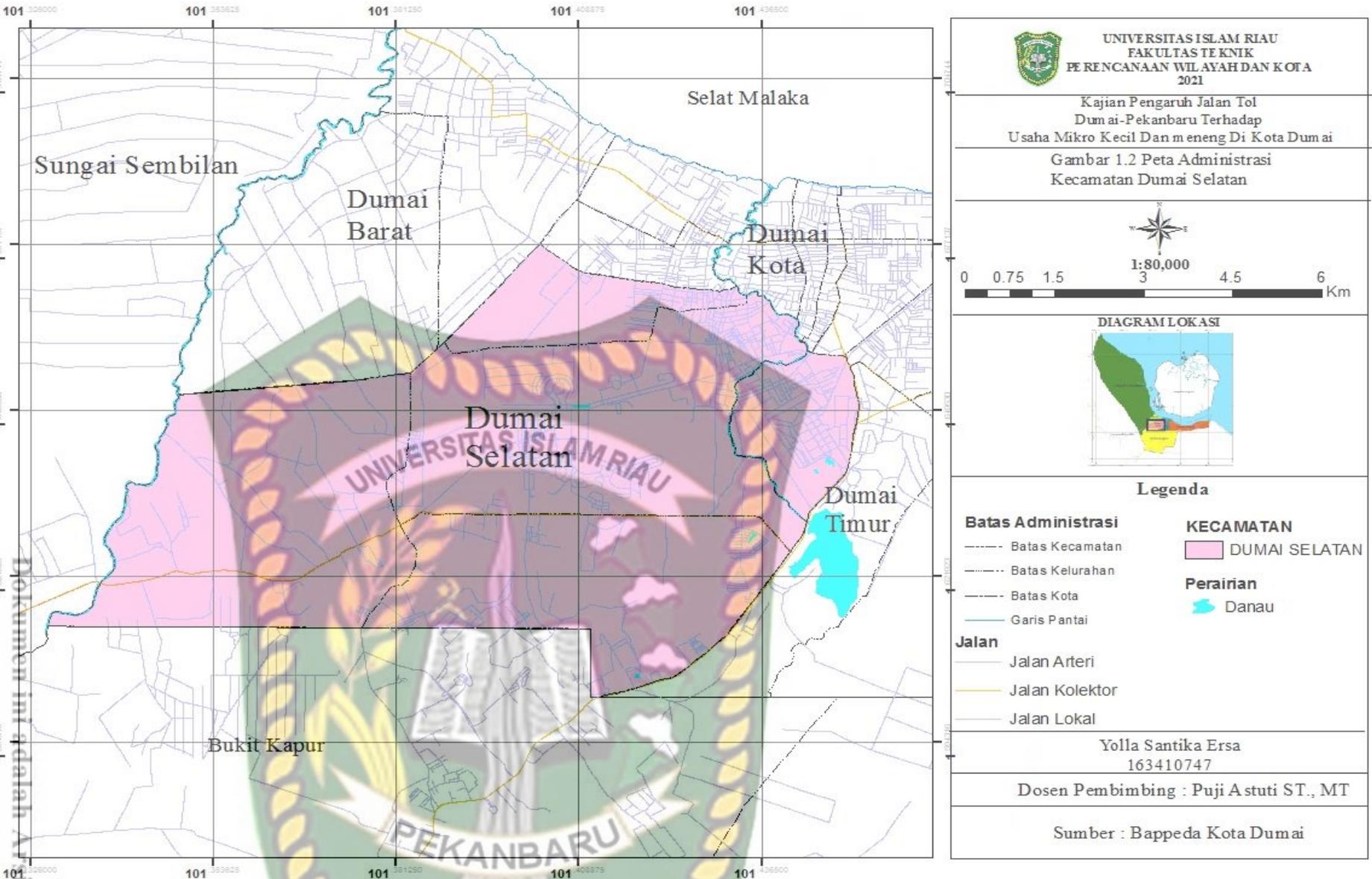
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah wilayah administrasi, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Kecamatan Dumai Selatan memiliki luas wilayah 73,50 km² merupakan kecamatan termuda di Kota Dumai dan terletak ditengah Kota Dumai. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Selatan memiliki batas-batas wilayah seperti berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dumai Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Sembilan.



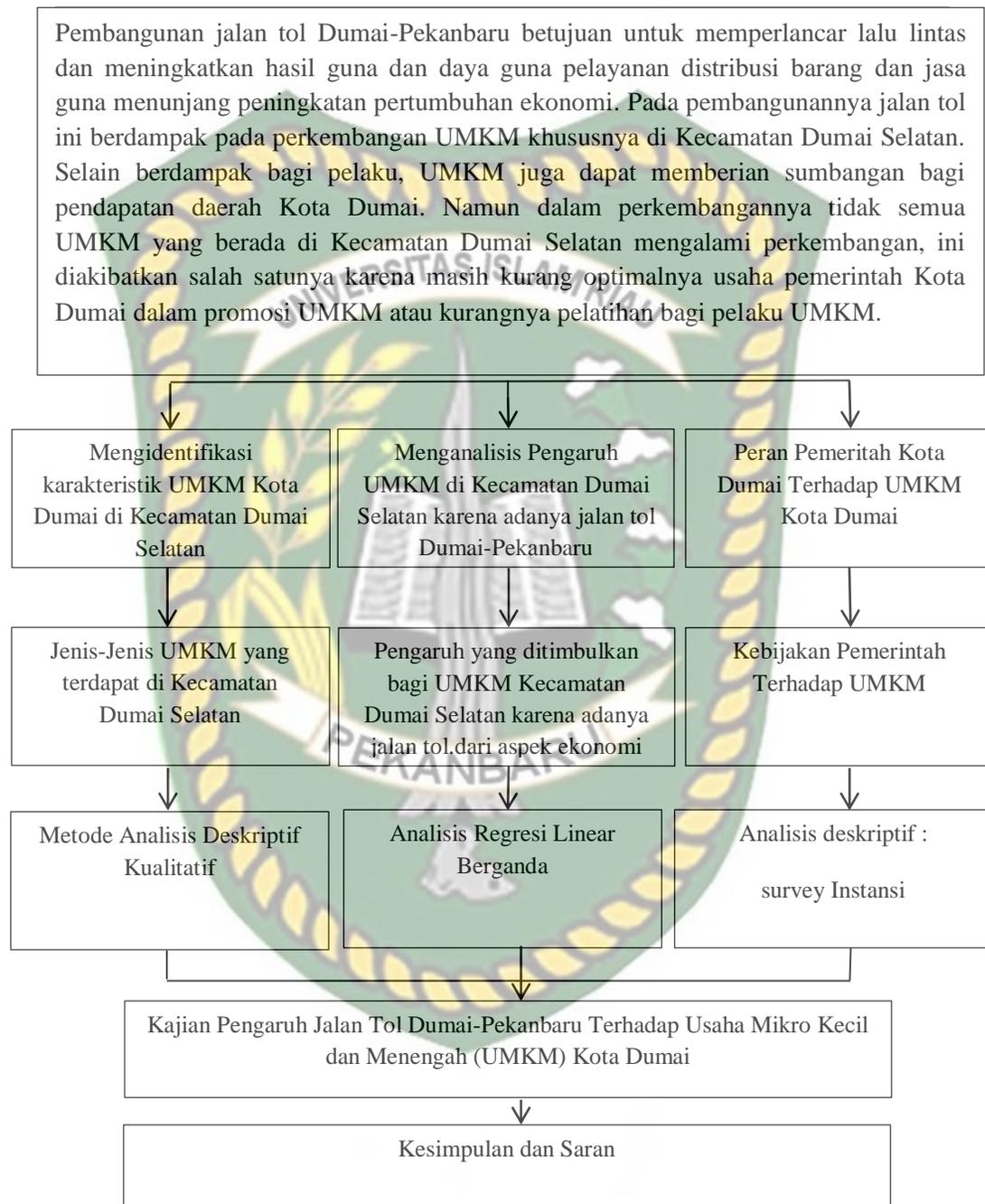
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Dumai



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Dumai Selatan

Dokumen ini adalah Arip Milik :

1.7 Kerangka pemikiran Studi



Gambar 1.3. Kerangka Berfikir

Sumber: Hasil Analisis, 2022

1.8 Sistematika Pembahasan

Pembahasan untuk bab-bab selanjutnya disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini meruakan awal penulisan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, ruang lingkup materi, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN TEORI

Memuat keterangan mengenai dasar-dasar teoritis serta kajian studi terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu “Kajian Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Dumai”. Teori-teori yang terkait dengan penelitian yaitu mengenai definisi Jalan Tol, Definisi, Kriteria, klasifikasi, karakteristik, hambatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengaruh jalan tol terhadap UMKM dalam aspek ekonomi, dan Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bab III METODELOGI PENEITIAN

Pada bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, variable penelitian, teknik pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran umum wilayah penelitian yaitu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau dengan kondisi fisik, ekonomi, sosial dan sarana prasarana yang menjabarkan mengenai gambaran umum aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian wilayah studi.

Bab V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisa dan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Pada bab ini masalah yang diangkat akan diselesaikan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dan diterapkan untuk menghasilkan jawaban serta uraian dari hasil yang telah dibuat.

Bab VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dicapai

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Perdagangan Dalam Perspektif Islam

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana perdagangan. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang persoalan perdagangan. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam perdagangan, sampai kepada etika sosio ekonomi menyangkut hak milik dan hubungan sosial (Taufiq, 2016).

Perdagangan juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikannya untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara manusia. Allah Swt berfirman:

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisa’ : 29).

Rasulullah juga turut menjelaskan dalam hadis sahihnya tentang perdagangan yang tidak dibenarkan. Bagaimana sikap yang semestinya dikembangkan para pedagang. Berikut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Ashbahani :

انتم نوا واذا ي خذ فوالم وعدوا واذا ي كذب والدم حدث وا اذا الذين ال تجار ك سب ال ك سب ا ط يب ان
لهم كان واذا ي مطلوا لم عد يهم كان واذا ي مدحوا لم باعوا واذا ي ذموا لم اش تروا واذا ي خودوا لم
ي عسروا لم

“Dari Mu’az bin Jabal, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit: (H.R Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani).

2.2 Definisi Jalan Tol

Pasal 1 angka 4 UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan, memberikan definisi mengenai jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan pasal 13 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, mempunyai kewajiban wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memudahkan masyarakat di Indonesia untuk bisa

melakukan mobilitas mereka baik dalam hal ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat. Pembangunan dengan skala besar selain membutuhkan modal besar, juga membutuhkan tanah untuk mendirikan bangunan tersebut. Jalan tol merupakan proyek yang digadang-gadang pemerintah dapat mengurangi kemacetan sampai dapat menjadi sumber pemasukan kas negara.

Pembangunan jalan tol sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu wilayah atau daerah, pembangunan jalan tol sedikit banyaknya berdampak terhadap pembangunan wilayah yang dilintasi (Manullang dan Hottua 2019). Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk memperlancar lalu lintas di daerah berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan ekonomi, meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan (Huda, 2010)

Pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat harus diimbangi dengan peningkatan sarana transportasi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu cara untuk memperlancar arus transportasi sehingga dapat terhindar dari volume kendaraan berlebih yang dapat menyebabkan kemacetan (Fakhurozi dkk, 2020). Menurut PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pengertian jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif, namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak

merupakan lintas alternatif. Pengenaan kewajiban membayar tol bagi penggunaannya dikarenakan uang yang dibayarkan oleh pengguna akan dimanfaatkan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Selain itu, pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan waktu, dibandingkan apabila melewati jalan non tol. Sementara badan usaha yang mengoperasikan dan memelihara jalan tol akan mendapatkan pengembalian investasi melalui tarif tol yang dibayar pengguna jalan tol.

2.3 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah telah menetapkan definisi UMKM dan kriteriannya. Hal tersebut tertuang dalam PP Nomor 7/2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU tersebut. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.3.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, pada pasal 35 dijelaskan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan berikut kriteria modal usaha

1. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas:

1. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

2.3.2 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Ade (2011) dalam Nuraini (2019) Dalam persektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki kontribusi paling besar dalam perekonomian nasional, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3.3 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam buku Pandji Anorga *dalam* Nuraini (2019) diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya

masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

2.3.4 Hambatan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Irfan Syauqi beik *dalam* Nuraini (2019) menjelaskan laju pertumbuhan usaha mikro masih lebih rendah (3,3 persen) dibandingkan laju pertumbuhan secara keseluruhan (4,4 persen) sehingga kesenjangan yang terjadi sangat lebar dengan usaha skala besar, yaitu 14.586 kali. Namun jika didukung dengan *supporting elements* yang tepat, maka bisa mempercepat perkembangan usaha mikro dan kecil, hal ini perlu diidentifikasi masalah secara tepat. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain yaitu:

1. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pula sistem kaderisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
3. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media *online* telah berkembang, namun media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.

4. Akses informasi usaha rendah.
5. Belum terjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antarpelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemitraan perlu dijalin agar mampu membuat sistem yang saling mendukung.

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, berbagai persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi, disamping tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembang UMKM.

Adapun contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan karakteristik UMKM menurut lembaga pengembangan perbankan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro contohnya yaitu usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang pasar
2. Usaha Kecil contohnya yaitu pedagang pasar di pasar grosir (agen) dan pedagang pengempul lainnya
3. Usaha Mikro contohnya yaitu usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan

2.4 Dampak Ekonomi Jalan Tol Terhadap UMKM

Pembangunan jalan tol dalam prakteknya identik dengan hambatan dari masyarakat sekitar. Namun hal tersebut dinilai wajar dikarenakan pembangunan jalan tol tidak terlepas dari dari aspek fisik dan aspek non-fisik pada masyarakat. Aspek

fisik berkaitan dengan lingkungan dan infrastruktur, sedangkan aspek non fisik berkaitan dengan sosial dan ekonomi masyarakat (Darwanto dkk, 2019). Transportasi barang dan orang merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan ekonomi. Penggunaan transportasi umumnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dan ini berlaku untuk transportasi darat. Namun, penggunaan transportasi dapat memicu eksternalitas seperti kebisingan, kecelakaan dan lainnya yang akhirnya dapat merugikan ekonomi. Kemacetan adalah contoh yang jelas dari keseimbangan penggunaan transportasi dan ekonomi (Ortega dkk, 2021). Dampak ekonomi dari infrastruktur transportasi secara umum diterima dalam teori, dimana dijelaskan bahwa investasi modal publik termasuk investasi transportasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif pada output ekonomi di tingkat nasional atau negara bagian. Sistem transportasi yang mendukung dengan aksesibilitas tinggi, mobilitas dan keandalan dapat mengurangi waktu dan biaya perjalanan, sehingga mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktifitas ekonomi di suatu daerah. Terdapat dua macam jalan bebas hambatan yaitu yang tidak berbayar (*freeway*) dan yang berbayar, disebut jalan tol (*toll road*) (Prasetyo, 2019)

Telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengaruh pembangunan infrastruktur jalan tol terhadap perkembangan wilayah dari aspek ekonomi dengan hasil beragam. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelum awal 1990-an, menemukan bahwa investasi modal publik, termasuk investasi transportasi, memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap output ekonomi ditingkat nasional atau negara bagian. Penelitian yang lain, terutama penelitian pada akhir 1990-an dan pada

pergantian abad, berpendapat bahwa efeknya mungkin lebih kecil atau tidak produktif (Li dan Whitaker, 2018 *dalam* Prasetyo 2019). Menurut Praseyo (2015) *dalam* Septian (2019) menjelaskan bahwa kewirausahaan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maka kewirausahaan harus tertanam dalam diri seseorang yang akan mendirikan suatu usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah. Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mampu menyediakan lapangan kerja sepenuhnya untuk merekrut para pencari kerja. (Prasetyo dan Ahamad 2019).

2.4.1 Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Daerah

Menurut Navastara (2014) *dalam* Halim (2020) mengemukakan bahwa kebijakan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan potensi wilayah adalah kebijakan penembangan ekonomi lokal. Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menjadi katup pengaman dari ekkses akibat krisis. Walaupun harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang berarti. Kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diakui juga diberbagai perekonomian daerah. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang dapat mencoba dan merumuskan kelembagaan-kelembagaan daerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk-produk unggulan yang lebih baik, pencarian pasar, ahli pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan industri kecil dan kegiatan usaha pada

skala lokal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini berperah sebagai kendaraan utama pemberdayaan ekonomi, memiliki karakteristik yang sama yaitu umumnya kecil mengkhhususkan pada bidang yang sama dan kurangnya ketersediaan sumber daya. (Phenyo dan Osden, 2020)

Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat besar dan pada banyak kasus di beberapa negara sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan pendapatan asli daerah (PAD). Pada krisis ekonomi 2009, peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerja masih bisa diandalkan. Rontoknya industri besar dan sektor formal pada umumnya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilihan yang paling rasional. Ini terjadi karena masalah struktur ekonomi yang ketergantungan pada ekonomi dunia sangat kuat (Halim, 2020).

2.4.2 Pengaruh UMKM terhadap Aspek Ekonomi

Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memebrikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dipandang sangat penting meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya (Halim, 2020).

2.4.2.1 Tingkat Pendapatan

Pendapatan dapat diperoleh dengan memulai melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan itu sendiri. Setiap orang menghendaki agar memperoleh pendapatan yang tinggi atau setidaknya dapat menutupi jenis dan prestasi kerjanya masing-masing. Jenis dan prestasi kerja seseorang juga berbeda menurut kemampuan. Keahlian dan ditambah kecakapan serta keuletan akan lebih mudah memperoleh kesempatan kerja yang lebih cepat memperoleh prestasi dalam bekerja, baik sebagai pegawai negeri, pengusaha, petani dan pedagang. Karena semua faktor tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang yang pada akhirnya mempengaruhi pada tingkat pendapatan (Sanusi dkk, 2015).

2.5 Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pemerintah UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan

memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Harap pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini instrumen dalam menyikapi kebutuhan pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (*year on year*) pada akhir agustus 2015. Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar dari KUR (Fahrul, 2020).

2.5.1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertama, UU Cipta Kerja menekankan adanya basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dimana kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan kluster menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Upaya sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketetatanegaraan Indonesia. Kedua, terkait dengan status Perseroan, UU Cipta Kerja mengatur pengecualian pendirian perseroan untuk UMK dimana untuk UMK dapat didirikan oleh 1(satu) orang dan pendiriannya cukup berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi umum dimana pendirian perseroan didirikan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja mengubah aturan batas minimumnya. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Apalagi ada pengaturan batas minimum pendirian pendiri per individu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.

2.5.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Pasal 48 Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- 2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- 3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyuluhan hukum;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi;
 - d) penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e) pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 49

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b) memiliki nomor induk berusaha; dan
- c) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 50

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan, bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- 2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b) lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c) perguruan tinggi.
- 3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) konsultasi hukum,
 - b) mediasi;
 - c) penyusunan dokumen hukum;
 - d) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e) pendampingan di pengadilan.
- 4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 51

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a) melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

- b) membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c) meningkatkan literasi hukum
- d) mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e) melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 52

- 1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan kewenangan.
- 2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepada Kementerian.
- 3) Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 53

- 1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:

- a) restrukturisasi kredit;
 - b) rekonstruksi usaha;
 - c) bantuan permodalan; dan/atau
 - d) bantuan bentuk lain.
- 2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

Pasal 55

- 1) Basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikoordinasikan oleh Kementerian.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - b) menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- 3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

- 4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 56

- 1) Untuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- 2) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- 3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 57

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 58

- 1) Kementerian menyebarluaskan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan Pemerintah Daerah.

- 2) Penyebarluasan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a) pemberian akses;
 - b) pendistribusian; dan
 - c) pertukaran data.
- 3) Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- 4) Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 60

- 1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- 2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;

- b. bandar udara;
- c. pelabuhan;
- d. stasiun kereta api;
- e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
- f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- 4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah.

Pasal 61

- 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 62

- 1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- 2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.
- 3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a) identitas para pihak;
 - b) hak dan kewajiban para pihak;
 - c) sanksi; dan
 - d) penyelesaian sengketa.
- 4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a) telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b) sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 63

- 1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

ayat (1) paling sedikit berupa:

- a) media luar ruang; dan
 - b) ruang pameran.
- 2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a) tempat berjualan;
 - b) tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c) pergudangan.
 - 3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
 - 4) penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 64

- 1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

- 2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- 3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.
- 4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Kementerian atau Dinas.

Pasal 65

- 1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Kementerian atau Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;

- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk

2.6 Fungsi Pelayanan Kota

Fungsi pelayanan kota adalah suatu pusat yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas sebagian wilayah kota, dimana memiliki hirarki, fungsi, skala, serta wilayah pelayanan yang lebih rendah dari pusat kota, tetapi lebih tinggi dari pusat lingkungan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Sistem Perkotaan Nasional terdiri dari salah satunya yaitu Pusat Kegiatan Nasional ditetapkan dengan kriteria:

- a) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
- b) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa skala nasional atau yang melayani skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi
- c) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi
- d) Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan

2.6 Sintesa teori

Tabel 2.1 Sintesa Teori

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
1.	Defenisi Jalan Tol	Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005	Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar.
2.	Defenisi UMKM	Undang-undang No. 20 Tahun 2008	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha Mikro adlah usaha produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.3. Usaha Menengah adalah usaha usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
			bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
3.	Kriteria UMKM	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
4.	Klasifikasi UMKM	Ade (2011)	UMKM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu <i>Livelihood Activities, Micro Enterprise, Small Dynamic Enterprise</i> ,dan <i>Fast Moving Enterprise</i> ,
5.	Karakteristik UMKM	Pandji Anoraga (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembukuan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. 2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi 3. Modal terbatas 4. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas 5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
			<p>mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.</p> <p>6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas</p> <p>7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya</p>
6.	Hambatan UMKM	Mutiara (2020)	<p>1. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan.</p> <p>2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha</p> <p>3. Kemampuan pemasaran yang terbatas.</p> <p>4. Akses informasi usaha rendah</p> <p>5. Belum terjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antarpelaku UMKM</p>
7.	Dampak ekonomi jalan tol terhadap UMKM	Septian (2019)	<p>Dampak ekonomi dari infrastruktur transportasi secara umum diterima dalam teori, dimana dijelaskan bahwa investasi modal publik termasuk investasi transportasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif pada output ekonomi di tingkat nasional atau negara bagian.</p>

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
8.	Kontribusi UMKM dalam Perekonomian daerah	Abdul (2020)	Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat besar dan pada banyak kasus di beberapa negara sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan pendapatan asli daerah (PAD).
9.	Pengaruh UMKM Terhadap Aspek Ekonomi	Abdul (2020)	Usaha Mikro Kecil dan Menengah berpengaruh terhadap beberapa aspek yaitu tingkat pendapatan, peluang usaha, dan tingkat pengangguran.
10.	Kebijakan UMKM	Fahrul (2020)	Peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Sumber : Hasil Analisis, 2022

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Sumber	Pengarang	Tujuan	Isi Penelitian
1	Dampak Pembangunan Jalan Tol Bocimi Terhadap Sosial, Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sukabumi	Jurnal Ilmiah Geoplanart 2.2. (2020): 75-88	Ina Revayanti (2019)	Mengetahui pengaruh pembangunan jalan tol terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitar konstruksi jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi di Kabupaten Sukabumi	Metode Penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian nya yaitu: a. Terjadinya perubahan sastra sosial masyarakat akibat adanya dana pengganti dari kegiatan pembangunan jalan tol. b. Terjadinya perubahan pola perikehidupan yang mendasar c. Minimnya kepedulian serta kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan struktur lingkungan
2.	Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap	Jurnal ilmiah akuntansi dan finansial Indonesia,	Januardin Manullang (2019)	Mengetahui pengaruh apa saja yang timbul dari dilakukannya	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan hasil peneltian sebagai berikut :

No.	Judul	Sumber	Pengarang	Tujuan	Isi Penelitian
	Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	2019, 3.1:45-54		pembangunan jalan tol Medan-Tebang Tinggi terhadap UMKM dikawasan bengkel	<p>a. Pendapatan per kapita dari UMKM pasar bengkel yang menurun drastis sampai 50% pendapatan perbulan.</p> <p>b. Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak UMKM yang semakin sedikit.</p> <p>c. Pendapatan Asli daerah yang berasal dari redistribusi, terjadi penurunan signifikan sejak dibangunnya jalan tol.</p> <p>d. Dampak positif yang dirasakan yaitu tidak terjadinya kemacetan dan polusi udara yang berkurang.</p>
3.	Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Akibat	Skripsi Universitas Islam Riau 2018	Marfi'ah Ayu Nurida (2018)	Mengidentifikasi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis <i>Expert Judgment</i> . Pembangunan jalan tol

No.	Judul	Sumber	Pengarang	Tujuan	Isi Penelitian
	Peembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai			Kelurahan Muara Fajar Timur akibat pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai	Pekanbaru-Dumai berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Muara Fajar. 30% masyarakat terganggu terhadap Polusi Udara yang ditimbulkan, tidak adanya konflik saat pembebasan lahan, pembangunan jalan tol sangat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kelurahan muara fajar, dan mengalami kenaikan jumlah pendapatan sebesar 70%
4.	Dampak Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Kelurahan Madyopuro	PhD Thesis Universitas Brawijaya, 2018	Nabila Cahaya Putra (2018)	Mengetahui gambaran dampak pembangunan jalan tol Pandaan-Malang terhadap aspek ekonomi masyarakat Madyopuro.	Dalam penelitian ini menggunakan analisis triangulasi. Dampak positif setelah adanya jalan tol: <ul style="list-style-type: none"> – Dampak pembangnan jalan tol Pandaan-Malang terdapat perubahan mata pencaharian masyarakat

No.	Judul	Sumber	Pengarang	Tujuan	Isi Penelitian
	Kecamatan Kedungkandang Kota Malang				<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat lebih giat bekerja dan berusaha melihat kondisi jalan yang besar dan transportasi yang lancar membuat daerah ini sangat strategis - Tingkat pendapatan masyarakat setempat meningkat <p>Dampak negative setelah adanya jalan tol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suasana menjadi bising - Warga terkena dampak penggusura harus kehilangan pekerjaan - Keadaan jalan yang membahayakan' - Warga khawatir masih ada penggusuran

No.	Judul	Sumber	Pengarang	Tujuan	Isi Penelitian
5	Dampak PT. Pelindo I Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota	Skripsi Universitas Islam Riau	Yoghi Fernando (2020)	Mengidentifikasi dampak dari PT Pelindo I terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota	Pengaruh dari adanya PT. Pelindo I saat ini belum dapat dirasakan adanya perubahan peningkatan ekonomi secara signifikan serta terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi berupa tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi namun tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang dibuktikan dari tingkat pendidikan para pekerja dan masyarakat yang ada di Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang dibantu dengan data kualitatif dan menggunakan analisis regresi linear

No.	Judul	Sumber	Pengarang	Tujuan	Isi Penelitian
					<p>berganda. Dimana hasil penelitiannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaruh signifikan antara PT.Pelindo I terhadap pendapatan masyarakat, pendidikan masyarakat - Tidak ada pengaruh anatar PT. Pelindo I terhadap pembiayaan dalam masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat, - Ada pengaruh tapi tidak signifikan antara PT. Pelindo I terhadap kesehatan masyarakat. - Ada pengaruh negative dan signifikan antara PT. Pelindo I terhadap pengobatan gratis masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (Gabungan) (Sugiyono, 2015). Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data primer. Metode survey dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan panduan pertanyaan dari kuesioner.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan yang mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Data kualitatif digunakan peneliti dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan menggunakan panduan pertanyaan untuk memahami secara mendalam dan rinci mengenai suatu peristiwa, serta dapat menggali berbagai realitas, proses sosial dan ekonomi, dan makna yang berkembang dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian.

Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan menggunakan panduan pertanyaan yang dituliskan. Data kualitatif ini

digunakan untuk mendukung dan sebagai interpretasi terhadap data yang di dapatkan dari data kuantitatif mengenai kebijakan Pemerintah Kota Dumai terhadap UMKM, pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk memperkuat hasil yang didapatkan. Selain itu penelitian deskriptif berguna untuk membuat penjelsan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Data merupakan sebuah fakta yang menggambarkan keadaan atau keterangan dari objek yang diteliti dilapangan. Jenis data terbagi dua, data primer dan data sekunder yang memiliki perbedaan dalam cara memperolehnya namun sama-sama sangat berguna untuk mendukung suatu penelitian.

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari obesrvasi lapangan atau survey lapangan yang meliputi wawancara dan penyebaran kuisisioner. Sampel informasi yang diambil dengan memilih responden yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara rinci tentang objek penelitian dan bisa dijadikan sumber data.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder ini data yang sifatnya mendukung keperluan data primer yang fungsinya untuk melengkapi kelengkapan data yang dibutuhkan. Data Sekunder diperoleh dengan mendatangi instansi terkait dengan dokumen yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau merupakan wilayah penelitian yang diambil oleh peneliti karena merupakan salah satu kecamatan yang memiliki UMKM yang terkena pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru. Dimana topik dari judul peneliti ialah meneliti tentang kajian pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai. Sedangkan waktu pelaksanaan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Uraian Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Pekerjaan	Bulan							
		2021/2022							
		6	7	8	9	10	11	12	1
1	Penyusunan Proposal Penelitian								
2	Seminar Proposal								
3	Pengumpulan Data								
	1. Data Primer								
	a. Kuesioner								
	b. Observasi								
	2. Data Sekunder								
4	Pengelohan dan Analisis Data								
5	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian								
6	Seminar Hasil								
7	Seminar Komprehensif								

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.4 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu teknik survey primer dan survey sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data pokok yang didapat langsung dari objek penelitian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Survei data primer dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk

mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Penggunaan metode yang digunakan disebut triangulasi dengan teknik yang banyak (*multiple methods*) yaitu penggunaan metode yang lebih dari satu tahap mulai dari observasi tentang suatu aspek, wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama, dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan interview, penyebaran kuisisioner untuk memperkuat jawaban dari responden tentang aspek yang sama (Yusuf, 2017). Berikut ini pengumpulan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, dimaksudkan untuk mencatat informasi-informasi secara langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengamatan langsung yang dilakukan dengan kegiatan Tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual atau audio visual.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Responden adalah orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. Angket digunakan dalam

penelitian ini termasuk jenis angket tertutup, yaitu angket yang menyajikan pertanyaan dan pilihan jawaban sehingga responden diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda *checklist*. Angket bersifat kooperatif dalam arti responden diharap bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara tertulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah *skala likert*. Skala ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama. Maka demikian tipe data yang digunakan adalah tipe interval 4. Untuk itu skor yang dapat diberikan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Sangat Setuju (SS) | : | 5 |
| b. Setuju (S) | : | 4 |
| c. Netral/Tidak Tau (N) | : | 3 |
| d. Tidak Setuju (TS) | : | 2 |
| e. Sangat Tidak Setuju (STS) | : | 1 |

Keuntungan *skala likert* :

1. Memiliki banyak kemudahan antara lain mudah dalam membuat skor, mudah dalam menyusun pertanyaan tentang sifat/sikap, mudah diinterpretasikan.
2. Mempunyai reliabilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas tertentu sikap tertentu.

3. Luwes dan Fleksibel. Peneliti bebas menetapkan jumlah pertanyaan, demikian juga jumlah alternated jawaban.

4. Lazim dipakai dalam penelitian-penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku undang-undang arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berisi tentang hal-hal yang bisa mendukung dan memiliki hubungan dengan data primer. Data sekunder dilakukan pengumpulan dari beberapa sumber sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tugas akhir ini. Literature dari beberapa dokumen, arsip, majalah, jurnal ilmiah, buku modul dan laporan penelitian dilakukan untuk kajian literature mengenai tinjauan teori yang sesuai dengan penelitian tugas akhir ini. Dalam melakukan pengumpulan data sekunder, dilakukan suevei sekunder meliputi :

1. Studi Pustaka, dilakukan melalui studi kepustakaan di buku-buku, hasil penelitian dan peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian.
2. Survei instansi, bertujuan mencari data-data pendukung yang berhubungan langsung dengan tema penelitian.

3.5 Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi berbagai tahap-tahap yang dapat mendukung dan memudahkan penelitian ini, sehingga tahap-tahap yang dilakukan berjalan sesuai tahapan-tahapannya, adapun tahap penelitian adalah sebagai berikut.

3.5.1 Tahap Persiapan

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap persiapan dalam tugas akhir ini adalah:

1. Menentukan lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
2. Mengurus perizinan untuk keperluan penelitian dan survei data berupa izin riset dari BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Riau, dan diteruskan ke Kesbangpol Kota Dumai untuk kemudia surat diperbanyak dan disebar ke instansi dan dinas terkait.
3. Menentukan kebutuhan data sekunder dan literatur-literatur yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Observasi yakni dilakukan *cross chek* antara data sekunder dan observasi lapangan.

3.5.2 Tahap Kompilasi Data

Tahap kompilasi data ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan karakteristik data tersebut. Data yang telah dikelompokkan tersebut akan menjadi bahan atau input bagi analisis-analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini dan ditampilkan dalam bentuk:

1. Tabulasi, yaitu dengan menampilkan data yang diperoleh dengan tabel-tabel.
2. Diagramatik, yaitu menampilkan data-data yang diperoleh dalam bentuk grafik atau diagram.
3. Peta, untuk memperjelas kondisi geografis lokasi penelitian.
4. Dokumentasi, merupakan salah satu hasil observasi langsung ke lokasi penelitian berupa foto selama kegiatan penelitian.

3.5.3 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini pada proses pengambilan data antara lain:

1. *Checklist* data, adalah daftar yang hendak diselidiki ataupun data yang dibutuhkan, agar catatan observasi tersusun atau tersistematiskan dengan baik dan memudahkan saat proses pengumpulan data.

2. Peta kondisi fisik wilayah studi, yaitu peta administrasi Kota Dumai, Peta Studi Kawasan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian pada proses pengambilan data adalah:

1. Kamera, yang akan digunakan sebagai dokumentasi dalam proses pengamatan
2. Alat tulis (pena dan buku), yang akan digunakan untuk menulis dan mencatat data yang dilakukan dalam penelitian
3. Penunjuk waktu, yang akan digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data
4. Laptop/komputer yang akan digunakan untuk mengolah data

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Populasi tidak hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 170 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2015). Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Sampling probability sampling* karena teknik pengambilan sampel ini memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sedangkan teknik pengambilan pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Simple random sampling*. Alasan menggunakan teknik *Simple random sampling* adalah karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Sumber: Sugiyono, 2015

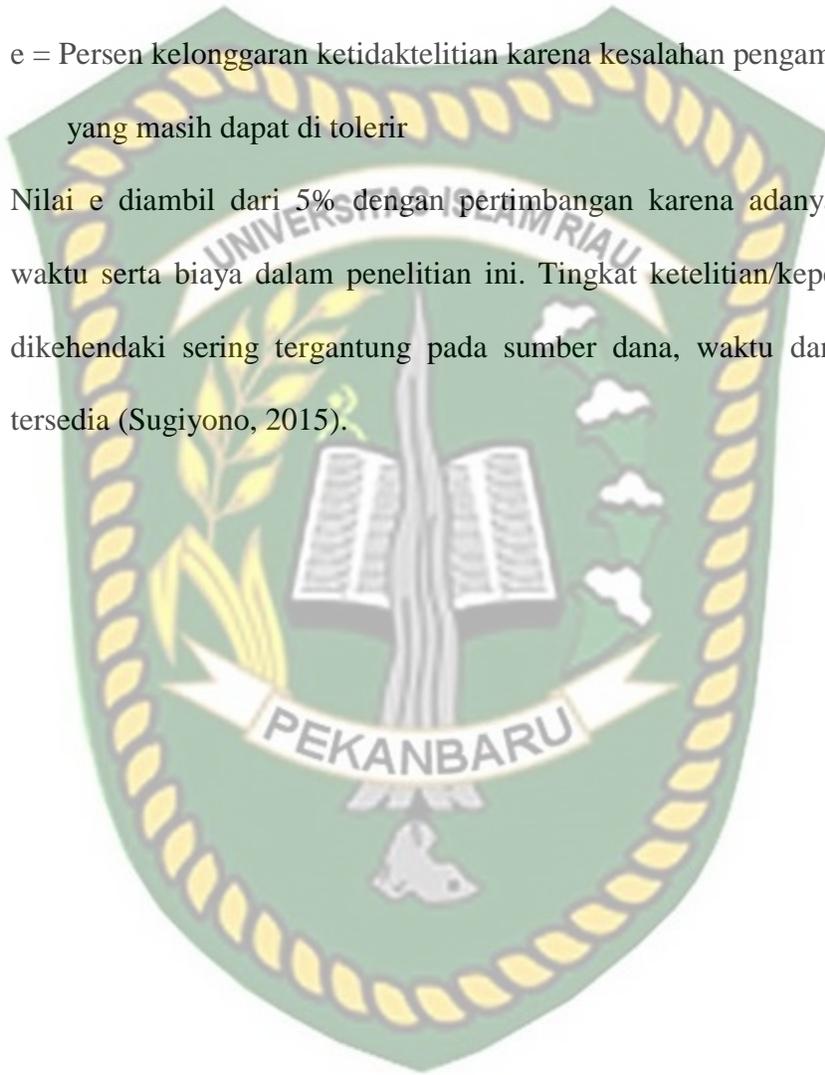
Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir

Nilai e diambil dari 5% dengan pertimbangan karena adanya keterbatasan waktu serta biaya dalam penelitian ini. Tingkat ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia (Sugiyono, 2015).



Tabel 3.2 Jumlah UMKM di Kota Dumai

Sekor Usaha	Kecamatan							Total Per kecamatan
	Bukit Kapur	Medang Kampai	Dumai Timur	Dumai Selatan	Dumai Kota	Dumai Barat	Sungai Sembilan	
Kerajinan	8	1	0	0	2	3	2	16
Olahan Makanan/Minuman	32	63	94	92	81	57	24	443
Perikanan	0	4	0	0	0	0	0	4
Pertanian, perkebunan, dan kehutanan	6	11	0	0	0	0	2	19
Peternakan	0	2	0	0	0	0	1	6
Perdagangan	100	58	57	55	62	74	121	527
Jasa	15	17	17	17	11	23	13	527
Inovatif dan Kreatif	0	1	0	3	0	0	0	4
Konveksi	0	0	6	3	2	4	4	10
Total	161	160	174	170	158	161	167	1151

Sumber : Dinas Kopersi Kota Dumai, 2020

Ukuran populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan. Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 170 UMKM. Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti sesuai rumus di atas adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Sumber: Sugiyono, 2015

$$n = \frac{170}{1 + 170 \cdot (0,05)^2} = 119,29 = 119 \text{ UMKM}$$

Jadi, banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 119 UMKM di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Roscoe dalam buku *research methods for business* (1982-253) dalam Yoghi Fernando, 2020 memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian berikut ini.

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai negri-swasta dan lain-lain maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi/regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen+dependen) maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$

4. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500
5. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai negeri-swasta dan lain-lain maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
6. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi/regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen+dependen) maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$
7. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20.

3.6.3 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik (Sugiyono, 2015)

Dalam penelitian ini *Purposive sampling* digunakan yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai atau mengumpulkan suatu data berupa dokumen yang didapati di suatu lembaga atau

dinas. Sehingga *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari Dinas Koperasi Kota Dumai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan Pemerintah Daerah Kota Dumai yang mengatur kebijakan Usaha MikroKecil dan Menengah. Masing-masing informan menurut peneliti mewakili terhadap focus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dengan mendatangi dinas terkait.

Tabel 3.3 Data informan yang diperlukan

No	Informan	Data yang diperlukan
1.	Ibuk Winda Yanti, S.sos., M.Si Kepala Bidang Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai	Peraturan Pemerintah Daerah tentang UMKM

Sumber : Hasil Analisis 2022

3.7 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan *Mixed Methods*, disebut metode *mix methods* karena analisis yang digunakan merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa metode analisis yakni analisis deskriptif kualitatif, kuantitatif, dan regresi linear sederhana. Tahap analisis penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

Dalam mengidentifikasi karakteristik UMKM di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mengetahui sektor-sektor UMKM apa saja yang ada di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

2. Dalam tahap mengidentifikasi kebijakan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggunakan analisis deskriptif dengan cara survei instansi untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Dumai terhadap UMKM di Kota Dumai.
3. Menganalisis pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan.

Dalam tahap menganalisis pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM di Kecamatan Dumai selatan menggunakan metode analisis regresi sederhana untuk melihat keterkaitan antar variabel pengaruh yang ditimbulkan dari jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan.

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependent. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus/linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Dalam mengkaji hubungan anatar variabel menggunakan regresi, terlebih dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut dengan

variabel tidak bebas dan satu atau lebih variabel bebas. Dalam regresi berganda dianggap kita mempunyai perubahan tak bebas Y yang tergantung pada sejumlah perubahan bebas X_1, X_2, \dots, X_p . Dalam persamaan matematika dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \dots + b_p X_{pi}$$

$a, b, b_1, b_2, \dots, b_p$ adalah parameter dan $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{pi}$ adalah perubahan yang ditentukan atau diketahui.

Regresi linear berganda hampir sama dengan regresi linear sederhana, hanya saja pada regresi linear berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan anatar dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X (Yoghi Fernando, 2020)

1. Variabel bebas (*independent variable*) (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya *dependent* (Sugiyono, 2015). Dalam analisis ini terdapat dua variabel bebas (*independent*) yaitu Keberadaan Jalan tol Dumai-Pekanbaru (X) dengan indikator Fungsi Pelayanan Kota (X1) dan Panjang Jalan Tol (X2)

2. Variabel terikat (*dependent variable*) (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel dependent atau

terikat pada analisis ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Y). Dengan indikator:

1. Tingkat pendapatan

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka skala yang digunakan adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*.

3.8.2 Uji Hipotesis

A. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi parsial. Pengujian ini dilakukan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Menurut Sugiyono (2012), menggunakan rumus

$$F = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : Sugiyono, 2015

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien kolerasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika nilai \leq atau sig $> \alpha$
- b. H_0 ditolak jika nilai \geq atau nilai sig $< \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Rancangan pengujian hipotesis statistic ini menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Jalan Tol Dumai-Pekanbaru, adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. $H_0 : \beta = 0$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
2. $H_1 : \beta \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan.

Kesimpulan :

- a) Jika sig $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b) Jika sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak

B. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh. Menurut Sugiyono (2015) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Sumber : Sugiyono, 2015

Keterangan:

- R^2 = Koefisien determinasi
 k = Jumlah variabel independent
 n = Jumlah anggota data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan 5% atau dengan *degree freedm*= $k (n-k-1)$ dengan kriteria sebagai berikut :

- a. H_0 ditolak jika $>$ atau nilai sig $< \alpha$
- b. H_0 diterima jika $<$ atau nilai sig $> \alpha$

Jika terjadi penerimaan, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan

pula pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh signifikan
 - b. $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan
1. Penetapan tingkat signifikan pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,5 ($\alpha=0$). Atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikan 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.
 2. Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

Uji t:

1. H_0 diterima jika nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$
2. H_0 ditolak jika nilai $-t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

Uji F :

1. H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
2. H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

3.9 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Analisis
Keberadaan Jalan Tol Dumai-Pekanbaru (Independent)	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi Pelayanan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaku UMKM terhadap keberadaan Jalan Tol Dumai-Pekanbaru Distribusi barang 	Regresi Linear Berganda
	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan tol 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu yang ditempuh Jumlah pengunjung 	
Pengaruh UMKM (Dependent)	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pendapatan Permintaan barang 	Regresi Linear Berganda

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.8 Desain Survey

Berikut ini tabel desain survey penelitian:

Tabel 3.5 Desain Survey

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Data	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisis	Output
1	Karakteristik Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria UMKM • Klasifikasi UMKM 	Persebaran UMKM	Primer dan Sekunder	Metode Analisis Kualitatif	Jenis-Jenis UMKM yang terdapat di Kecamatan Dumai Selatan
2.	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah Kota Dumai terhadap UMKM	Kebijakan Pemerintah Kota Dumai	Peraturan Pemerintah Kota Dumai Tentang UMKM	Sekunder	Metode Analisis Deskriptif	Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Terhadap UMKM Kota Dumai
3.	Menganalisis Pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap UMKM di Kecamatan Dumai Selatan	Keberadaan Jalan Tol Dumai-Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Kegiatan Kota • Panjang Jalan Tol 	Data Responden melalui wawancara dan kuesioner	Primer dan Sekunder	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Teridentifikasi pengaruh keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
		Pengaruh UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendapatan 	Data Responden melalui wawancara dan kuesioner	Primer dan Sekunder	Metode analisis Regresi Linear Berganda	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

4.1.1 Luas dan Letak Wilayah

Kota Dumai terletak pada posisi antara 1°23'00"-1°24'24" Lintang Utara dan 101°23'37"-101°28'13" Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 1,727.38 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 1.727,38 Km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan dengan jarak ke ibukota kabupaten terjauh adalah Kecamatan Medang Kampai. Sebagian wilayah Kota Dumai terdiri dari dataran rendah dibagian Utara dan sebagian dataran tinggi di bagian Selatan. Wilayah kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu

sungai. Sungai Buluala, Sungai Snepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga Sungai yang terpanjang.

Kota Dumai terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Dumai Kota

Tabel 4.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Kota Dumai

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Wilayah
1.	Bukit Kapur	Bukit Nenas	200,00	11,58
2.	Medang Kampai	Teluk Makmur	373,00	21,59
3.	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	975,38	56,47
4.	Dumai Barat	Purnama	44,98	2,60
5.	Dumai Selatan	Bukit Datuk	73,50	4,26
6.	Dumai Timur	Teluk Binjai	47,52	2,75
7.	Dumai Kota	Laksamana	13,00	0,75

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka, 2020

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Dumai Selatan

4.2.1 Letak dan Administrasi Kecamatan Dumai Selatan

Kecamatan Dumai Selatan merupakan salah satu kecamatan termuda di Kota Dumai dengan luas daratan 73,50 km². Letak Kecamatan Dumai Selatan tepat berada di tengah Kota Dumai Selatan dengan Ibukota Kecamatan Bukit Dauk. Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Selatan menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan

laut/dpl) yaitu berada antara 0-25 dpl. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relative datar.

Berdasarkan posisi geogafisnya, Kecamatan Dumai Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara bebatasan dengan Kecamatan Dumai Barat
- b. Sebelah Timur bebrbatasan dengan Kecamatan Dumai Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Sembilan

Kecamatan Dumai Selatan terdiri dari 5 Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Mekar Sari
- b. Kelurahan Bukit Timah
- c. Kelurahan Bumi Ayu
- d. Kelurahan Bukit Datuk
- e. Kelurahan Ratu Sima

4.2.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Dumai Selatan berjumlah tahun 2019 sebesar 55.523 jia. Dengan luas wilayah 73,50 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 55.523 jiwa, maka kepadatan penduduk Kecamatan Dumai Selatan rata-rata 755,41 jiwa/km², artinya pada setiap kilometer persegi wilayah Kecamatan Dumai Selatan dihuni 755 orang penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Dumai Selatan, 2019

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Mekar Sari	3.061	2.930	104.47
2.	Bukit Timah	3.691	3.533	104.47
3.	Bumi Ayu	6.115	5.853	104.48
4.	Bukit Datuk	8.241	7.886	104.50
5.	Ratu Sima	7.263	6.950	104.50
Jumlah/Total		28.371	27.152	104.49

Sumber: Kecamatan Dumai Selatan Dalam Angka 2020

4.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Dumai Selatan

4.3.1 Kondisi Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Dumai Selatan tahun 2019 berupa pendidikan dasar tercatat sebanyak 15 unit Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). untuk pendidikan menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Dumai Selatan tahun 2019 terdapat 12 unit. Sedangkan jenjang pendidikan menengah menengah atas seperti Sekolah Menengah Atas(SMA) atau Sekolah Menengah Utama (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta pada tahun 2019 di Kecamatan Dumai Selatan tercatat sebanyak 12 unit.

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Dumai Selatan

No.	Kelurahan	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
1.	Mekar sari	1	3	2	1	1
2.	Bukit Timah	3	3	2	1	1
3.	Bumi Ayu	2	2	1	1	-
4.	Bukit Datuk	6	4	4	3	1
5.	Ratu Sima	4	3	3	1	2
Jumlah/Total		16	15	12	7	5

Sumber: Kecamatan Dumai Selatan Dalam Angka 2020

4.3.2 Kesehatan

Pemerintah menyediakan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hingga akhir tahun 2019 pemerintah menyediakan Puskesmas Bukit Timah dan Puskesmas Bumi Ayu untuk melayani masyarakat Kecamatan Dumai Selatan. Selain puskesmas pemerintah juga membangun 6 unit pos kesehatan kelurahan (poskesel). Untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak pemerintah juga membentuk 29 pos pelayanan terpadu (Posyandu). Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Dumai Selata sebanyak 56 orang. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk Kecamatan Dumai Selatan sebesar 0.95 yang mengandung arti bahwa setiap 1.000 orang penduduk Kecamatan Dumai Selatan hanya ada 1 tenaga kesehatan. Keluarag berencana (KB) menunjukkan perkembangan yang sangat pesat disebabkan dukungan dan pasrtisipasi aktif dari masyarakat terutama pasangan usia subur.

Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Dumai Selatan 2019

N o.	Kelurahan	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesel /Polindeg	Posyandu
1.	Mekar sari	-	-	-	1	6
2.	Bukit Timah	-	1	-	1	5
3.	Bumi Ayu	-	1	-	1	5
4.	Bukit Datuk	1	-	-	1	6
5.	Ratu Sima	-	-	-	2	7
Jumlah/Total		1	2	-	6	29

Sumber: Kecamatan Dumai Selatan Dalam Angka 2020

4.3.3 Tempat Peribadahan

Penduduk Kecamatan Dumai Selatan sangat heterogen, namun kerukunan hidup beragam nampaknya sangat terjaga dengan baik sehingga hubungan antar umat beragam terjalin dengan mesra. Hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama yang ada.

Tabel 4.5 Jumlah Tempat peribadahan di Kecamatan Dumai Selatan 2019

No	Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1.	Mekar Sari	9	6	2	-	-
2.	Bukit Timah	8	4	3	-	-
3.	Bumi Ayu	5	5	-	-	-
4.	Bukit Datuk	12	6	3	-	-
5.	Ratu Sima	8	7	7	-	-
Jumlah/ total		42	28	15	-	-

Sumber: Kecamatan Dumai Selatan Dalam Angka 2020

4.3 Gambaran Umum Jalan Tol Dumai-Pekanbaru

4.3.1 Sejarah singkat Utama Karya Infrastruktur

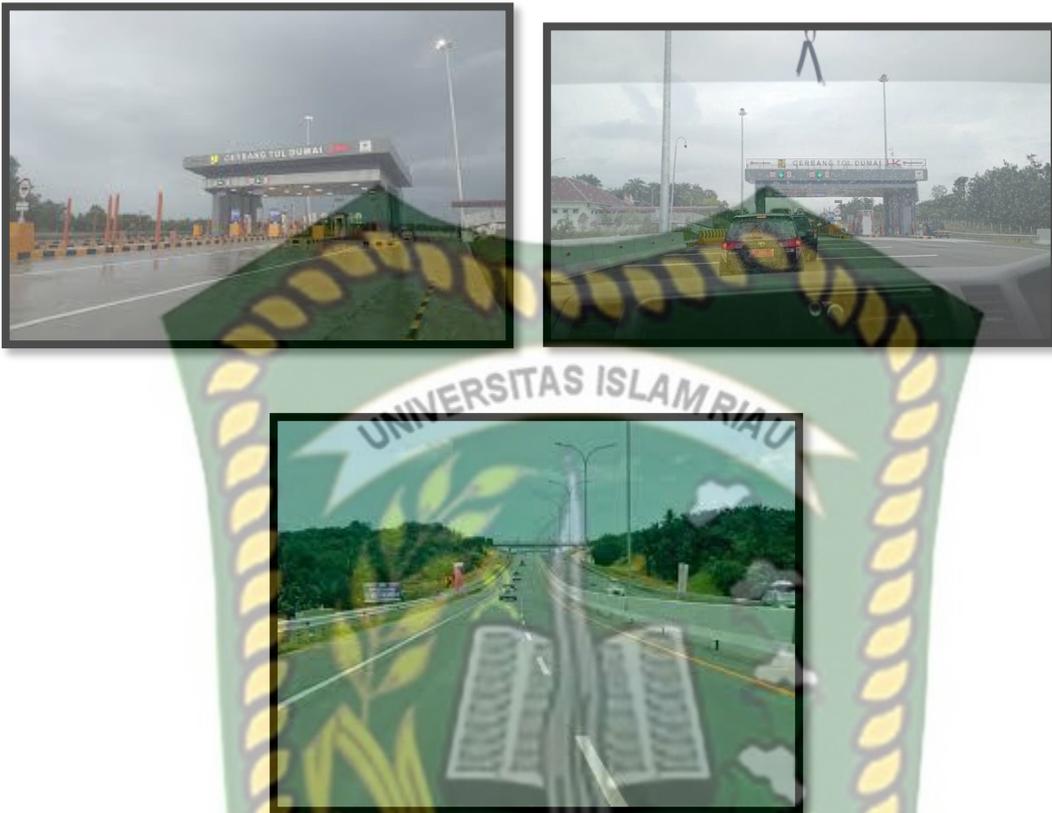
PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) adalah salah satu anak perusahaan dari BUMN PT Utama Karya (Persero) (HK) di bidang usaha jasa konstruksi. Didirikan sejak tahun 2015, Utama Karya Infrastruktur merupakan *spin-off* dari Divisi jalan dan jembatan milik HK yang sudah berkriprah 1961 dengan segudang pengalaman di bidang konstruksi jalan, jalan tol jembatan, dan pekerjaan-pekerjaan kain yang sejenis. HKI berdiri sebagai salah satu implementasi strategi *value capture* dalam rangka optimalisasi manfaat atas penugasan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang diamanatkan pemerintah Republik Indonesia kepada HK.

Diantara seluruh jalan tol Trans Sumatera yang dipercayakan untuk dibangun kepada HKI, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai adalah ruas yang terpanjang. Membentang sepanjang 131 Km, jalan tol Pekanbaru-Dumai ini memiliki desain yang sangat memperhatikan konservasi lingkungan sekitar, khususnya untuk habitat gajah yang berada di Balai Raja di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Siak. Untuk mendukung hal itu, HKI membangun setidaknya lima *underpass* untuk perlintasan gajah sehingga keberadaan jalan tol Pekanbaru-Dumai tidak mengganggu habitat gajah. Keberadaan jalan tol Pekanbaru-Dumai juga diprediksi akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan arus logistic, karena perjalanan dari Pekanbaru ke Dumai yang sebelumnya harus ditempuh selama 7-8 jam melalui jalur lintas nasional, kini cukup 2 jam saja dengan menggunakan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Jalan tol Pekanbaru-Dumai (Permai) telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo secara virtual pada Jumat, 25 September 2020

dari Istana Kepresidenan Bogor dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Jalan tol Permai, yang merupakan salah satu ruas dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), ini dibangun oleh anak usaha BUMN PT. Hutama Karya (Persero) (HK) bernama PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sejak tahun 2017. Jalan tol dengan panjang 131 km tersebut terdiri dari 6 (enam) seksi yakni yaitu seksi 1 Pekanbaru-Minas (9,5 km), seksi 2 Minas-Kandis Selatan (24,1 Km), seksi 3 Kandis Selatan-Kandis Utara (16,9 Km), seksi 4 Kandis Utara-Duri Selatan (26,2 Km), seksi 5 Duri Selatan-Duri Utara (29,45 Km). dan seksi 6 Duri Utara- Dumai (25,05 Km).

HKI berupaya untuk terus mengedepankan inovasi dan terobosan terbaru dalam setiap proses pekerjaannya. Dalam pembangunan jalan tol Permai seksi 4, HKI menggunakan teknologi CSP dan Mortar busa sepanjang 159 meter. CSP merupakan inovasi struktur baja plat yang dimodifikasi dengan bentuk bergelombang sehingga kekuatan strukturnya meningkat hingga 50 kali lipat. Mortar busa merupakan bahan pengganti/agregat di atas CSP untuk memiliki keunggulan yakni berat jenisnya yang hanya 0,9 ton/m³ atau kurang lebih setara dengan setengah dari berat timbunan tanah, namun memiliki daya tahan (*strength*) tinggi. Penggunaan CSP dan mortar busa menjadikan jalan tol permai sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang menggunakan CSP dan Mortar Busa di jalur utamanya (*Main Road*). Dibandingkan menggunakan timbunan, penggunaan CSP dan mortar busa pada *main road* jalan tol lebih ringan secara bobot sehingga pondasi struktur kuat dengan durabilitas tinggi.



Gambar 4.1 Kondisi Jalan Tol Dumai-Pekanbaru
Sumber: Hasil Survey, 2022

4.3.2 Visi dan Misi PT. Utama Karya Infrastruktur

Visi *Indonesia's Leading Integrated Construction Company* merupakan visi dari Utama Karya Infrastruktur (HKI). Misi dari PT Utama Karya Infrastruktur yaitu:

1. Menyukseskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan melakukan ekspansi pasar untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh dan inovatif dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.
3. Meningkatkan kapasitas finansial yang dapat mendukung pertumbuhan usaha
4. Menerapkan budaya perusahaan terutama *safety* dan *environmental friendly* dalam beraktivitas pekerjaan.

4.3.3 Tujuan dan Manfaat Jalan Tol

Tujuan penyelenggaraan jalan tol menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol yaitu sebagai berikut :

1. Memperlancar lalu lintas didaerah yang telah berkembang.
2. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan
4. Meringkankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan

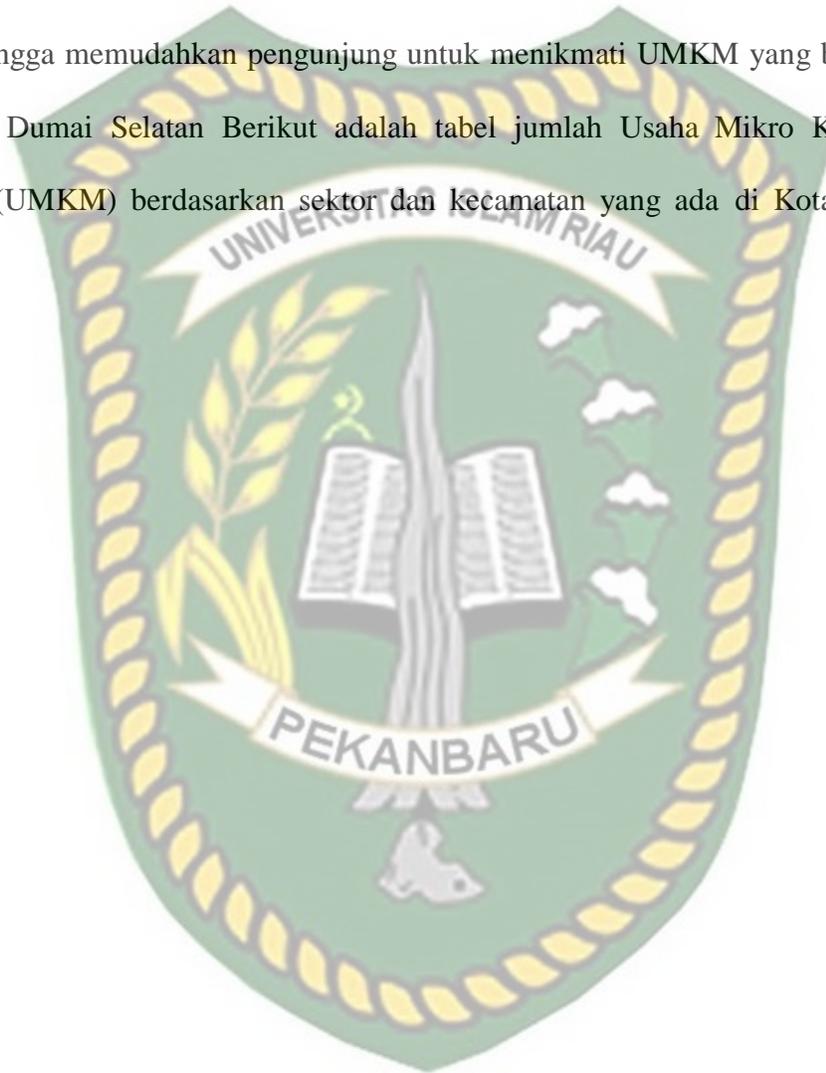
Adapun manfaat jalan tol yait sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi
2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang
3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol
4. Badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.

4.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai

Kota Dumai memiliki 1151 UMKM yang beragam dan tersebar di seluruh 7 Kecamatan yang ada di Kota Dumai. Adapun sektor usaha yang ada di Kota Dumai dibagi menjadi 9 sektor usaha dimana sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak yang ada di Kota Dumai disusul oleh oalahan makanan/minuman, selanjutnya jasa, lalu yang keempat paling banyak yaitu konveksi, pertanian, perkebunan dan kehutanan setelah itu yang keenam kerajinan, setelah itu peternakan dan yang terakhir perikanan serta inovatif dan kreatif merupakan sektor usaha yang paling sedikit. Adapun Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang paling banyak ada di Kecamatan Dumai Timur, setelah itu Dumai Selatan, Sungai Sembilan, Dumai Barat dan Bukit Kapur, Medang kampai dan yang terakhir di Dumai Kota yang memiliki UMKM paling sedikit di anatar Kecamatan yang lain. Walaupun di Kecamatan Dumai Selatan adalah UMKM terbanyak kedua setelah Dumai Timur, namun Dumai Selatan memiliki UMKM yang menjadi utama bagi

Kota Dumai karena UMKM yang menjual oleh-oleh khas Kota Dumai yang dapat menarik pengunjung untuk menjadikan keripik ubi kayu sebagai buah tangan yang bisa di bawa. Selain itu letak Kecamatan Dumai Selatan berada di tengah-tengah Kota Dumai sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati UMKM yang berada di Kecamatan Dumai Selatan Berikut adalah tabel jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan sektor dan kecamatan yang ada di Kota Dumai.



Tabel 4.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai

Sektor usaha	Kecamatan							Total Perkecamatan
	Bukit Kapur	Medang Kampai	Dumai Timur	Dumai Selatan	Dumai Kota	Dumai Barat	Sungai Sembilan	
Kerajinan	8	1	0	0	2	3	2	16
Olahan Makanan/minuman	32	63	94	92	81	57	24	443
Perikanan	0	4	0	0	0	0	0	4
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	6	11	0	0	0	0	2	19
Peternakan	0	5	0	0	0	0	1	6
Perdagangan	100	58	57	55	62	74	121	527
Jasa	15	17	17	17	11	23	13	113
Inovatoif dan Kreatif	0	1	0	3	0	0	0	4
Konveksi	0	0	6	3	2	4	4	19
Total	161	160	174	170	158	161	167	1151

Sumber : Dinas Koperasi Kota Dumai, 2020



Gambar 4.2 Kondisi UMKM Kecamatan Dumai Selatan
Sumber: Hasil Survey, 2022

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdapat di Kecamatan Dumai Selatan yaitu 170 UMKM dimana tersebar di 5 kelurahan adapun jenis-jenis UMKM yang berada di Kecamatan Dumai Selatan yaitu olahan makanan/minuman, perdagangan, jasa, inovatif dan kreatif, dan konveksi dimana UMKM yang tersebar tertera pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Persentase Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan

Sektor Usaha	Kelurahan					Total	Persentase %
	Bukit Datuk	Bukit Timah	Ratu Sima	Bumi Ayu	Mekar Sari		
Kerajinan	0	0	0	0	0	0	0
Olahan Makanan/Minuman	10	16	15	13	38	92	54
Perikanan	0	0	0	0	0	0	0
Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0
Peternakan	0	0	0	0	0	0	0
Perdagangan	1	25	7	3	19	55	32
Jasa	0	7	1	0	9	17	10
Inovatif Dan Kreatif	1	1	0	1	0	3	2
Konveksi	0	1	0	1	1	3	2
TOTAL	12	50	23	18	67	170	100

Sumber : Hasil Analaisis, 2022

Adapun peresentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai berdasarkan data dari rekap sektoral Dinas Kopreasi Kota Dumai tahun 2020 seperti tertera pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai

No	Kelurahan	Jumlah UMKM	Persentase (%)
1	Bukit Datuk	12	7
2	Bukit Timah	50	29
3	Ratu Sima	23	14
4	Bumi Ayu	18	11
5.	Mekar Sari	67	39
Total		170	100

Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Tabel 5.1 dan tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang paling berdominan ada di Kecamatan Dumai Selatan adalah sektor usaha olahan makanan/minuman yaitu sebanyak 92 dengan persentase 54% dari seluruh sektor usaha Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membeli olahan makanan/minuman lebih banyak. Lalu sektor terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan sebanyak 55 dengan persentase 32% , selanjutnya pada sektor jasa merupakan sektor terbanyak ketigayaitu 17 dengan persentase 10% inovativ dan kreatif serta konveksi merupakan sektor paling sedikit di Kecamatan Dumai Selatan yaitu sebanyak masing-masing 3 UMKM dengan persentase 2%. Sementara itu berdasarkan wilayah yang paling banyak terdapat Usaha Mikro kecil dan Menengah yaitu terletak di Kelurahan mekar sari dengan jumlah 67 Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) dengan persentase sebesar 39%. Selanjutnya wilayah yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbanyak kedua yaitu pada wilayah Kelurahan Bukit Timah dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 50 dengan persentase 29%. Selanjutnya Kelurahan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbanyak ketiga yaitu terdapat di Kelurahan Ratu Sima dengan Jumlah 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan persentase 14%. Selanjutnya pada Kelurahan Bumi Ayu terdapat jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 18 dengan persentase 11% dan wilayah yang memiliki jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling sedikit yaitu terletak di Kelurahan Bukit Datuk dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 12 dengan persentase 7%.

Adapun Karakteristik pelaku UMKM di Kecamatan Dumai Selatan yaitu:

1. Umur

Komposisi responden berdasarkan umur, secara umum berkisar 18 tahun sampai 60 tahun, seperti tertera pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 Umur Responden

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	18 - 31 tahun	43	36
2	32 - 46 tahun	65	55
3	47 - 60 tahun	11	9
Total		119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.3 diatas umur responden pada penelitian ini yang paling berdominan adalah 32-46 tahun sebanyak 65 orang dengan persentase 55% dari seluruh persentase jawaban responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pengalaman hidup yang cukup dan merupakan dominan umur yang masih produktif untuk menjadi pelaku UMKM.

Pada penelitian ini juga dijumpai responden dengan usia 18-31 tahun sebanyak 43 tahun dengan persentase 36%, dan 47-60 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 9%.

2. Tingkat pendidikan

Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan, secara umum adalah Sekolah Dasar hingga Strata Satu (S1), seperti tertera pada tabel 5.4 berikut

Tabel 5.4 Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD	15	13
2	SMP	31	26
3	SMA	73	61
4	D3/S1	0	0
Total		119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah tamatan SMA sederajat sebanyak 73 responden dengan persentase 61%. Maka rata-rata pelaku UMKM paling banyak dengan tingkat

pendidikan terakhir adalah SMA/SMK sederajat. Pada penelitian ini juga ada yang tingkat pendidikan dengan tamatan SMP sebanyak 31 responden dengan persentase 26%. Kemudian pada tingkatan SD sebanyak 15 responden dengan persentase 13%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden secara pendidikan telah mewakili tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Dumai Selatan.

3. Pendapatan

Komposisi responden berdasarkan pendapatan, secara umum sesuai dengan UMR di Kota Dumai pada tahun 2021, seperti tertera pada tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Pendapatan Responden

No	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< Rp. 3.300.000	88	74
2	> Rp. 3.300.000	31	26
Total		119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan responden yang paling dominan <3.300.000 dengan jumlah responden 88 orang dengan persentase 74%, dan 31 orang responden dengan persentase 26% memiliki tingkat pendapatan <Rp. 3.300.000.

4. Lama Usaha

Komposisi responden berdasarkan lama usaha, secara umum <5 tahun hingga >26 tahun. Seperti dijelaskan pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6 Lama Usaha Responden

No	Lama Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< 5 tahun	2	2
2	6 - 10 tahun	94	79
3	11 - 15 tahun	23	19
4	16 -20 tahun	1	0
5	21 - 25 tahun	0	0
6	> 26 tahun	0	0
Total		119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dilihat berdasarkan lama usaha responden yang paling dominan adalah 6-10 tahun dengan jumlah responden 94 orang dengan persentase 79%. Dan selanjutnya 11-15 tahun dengan 23 responden dengan persentase 19%. Selanjutnya <5 tahun dengan sebanyak 2 responden dengan persentase 2% dan lama usaha 16-20 tahun sebanyak 1 orang.

5.1.1 Usaha Mikro

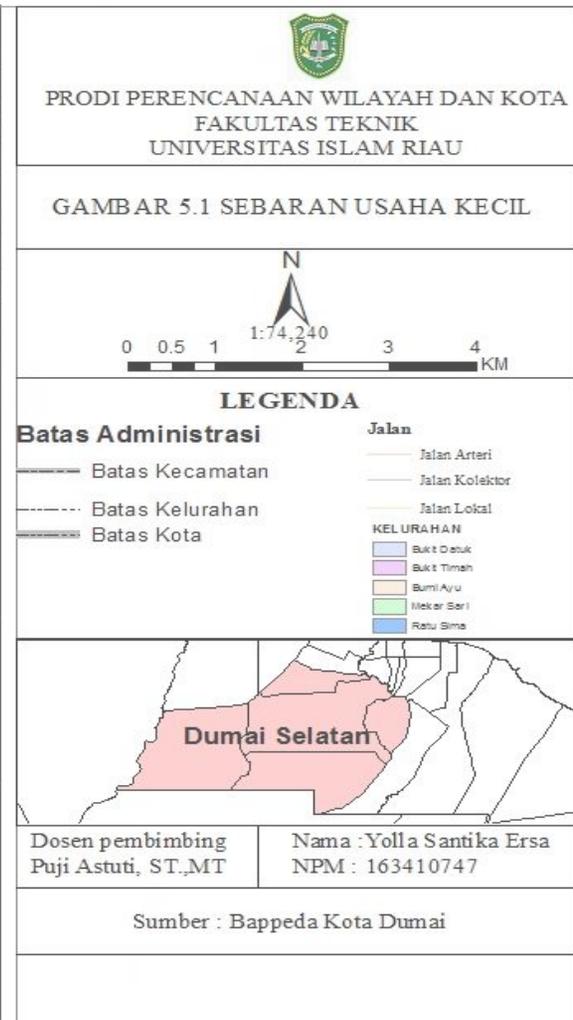
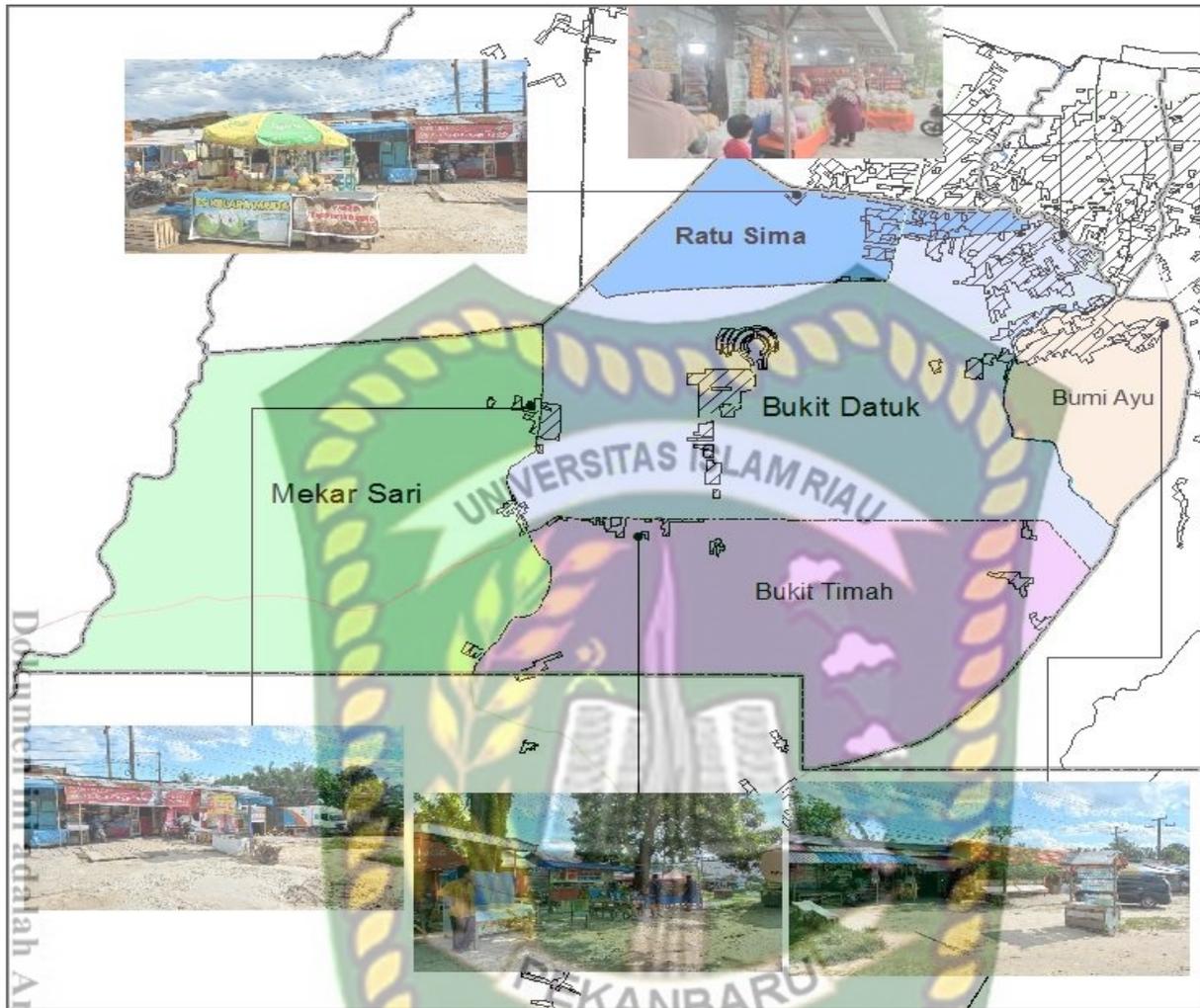
Usaha mikro yang ada terdapat di Kecamatan Dumai Selatan yaitu sebanyak seperti tertera pada tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7 Jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Dumai Selatan

NO	USAHA MIKRO	JUMLAH	PERSENTASE %
1	BUKIT DATUK	12	7
2	BUKIT TIMAH	38	26
3	RATU SIMA	23	16
4	BUMI AYU	17	12
5	MEKAR SARI	57	39
TOTAL		147	100

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.7 diatas Jumlah usaha mikro yang ada di Kecamatan Dumai Selatan yaitu berjumlah 147, dimana usaha mikro paling banyak terletak di Kelurahan Mekar sari yaitu sebanyak 57 dengan persentase 39% usaha mikro. Pada penelitian ini juga dijumpai pada kelurahan Bukit Timah memiliki usaha mikro sebanyak 38 dengan persentase 26%, pada Kelurahan Ratu Sima sebanyak 23 dengan persentase 16%, setelah itu pada Kelurahan Bumi Ayu sebanyak 17 dengan persentase 12% dan pada Kelurahan Bukit Datuk memiliki Usaha Mikro paling sedikit yaitu sebanyak 12 usaha dengan persentase 7.



Gambar 5.2 Sebaran Usaha Mikro

Sumber: Hasil Survey, 2022

5.1.2 Usaha Kecil

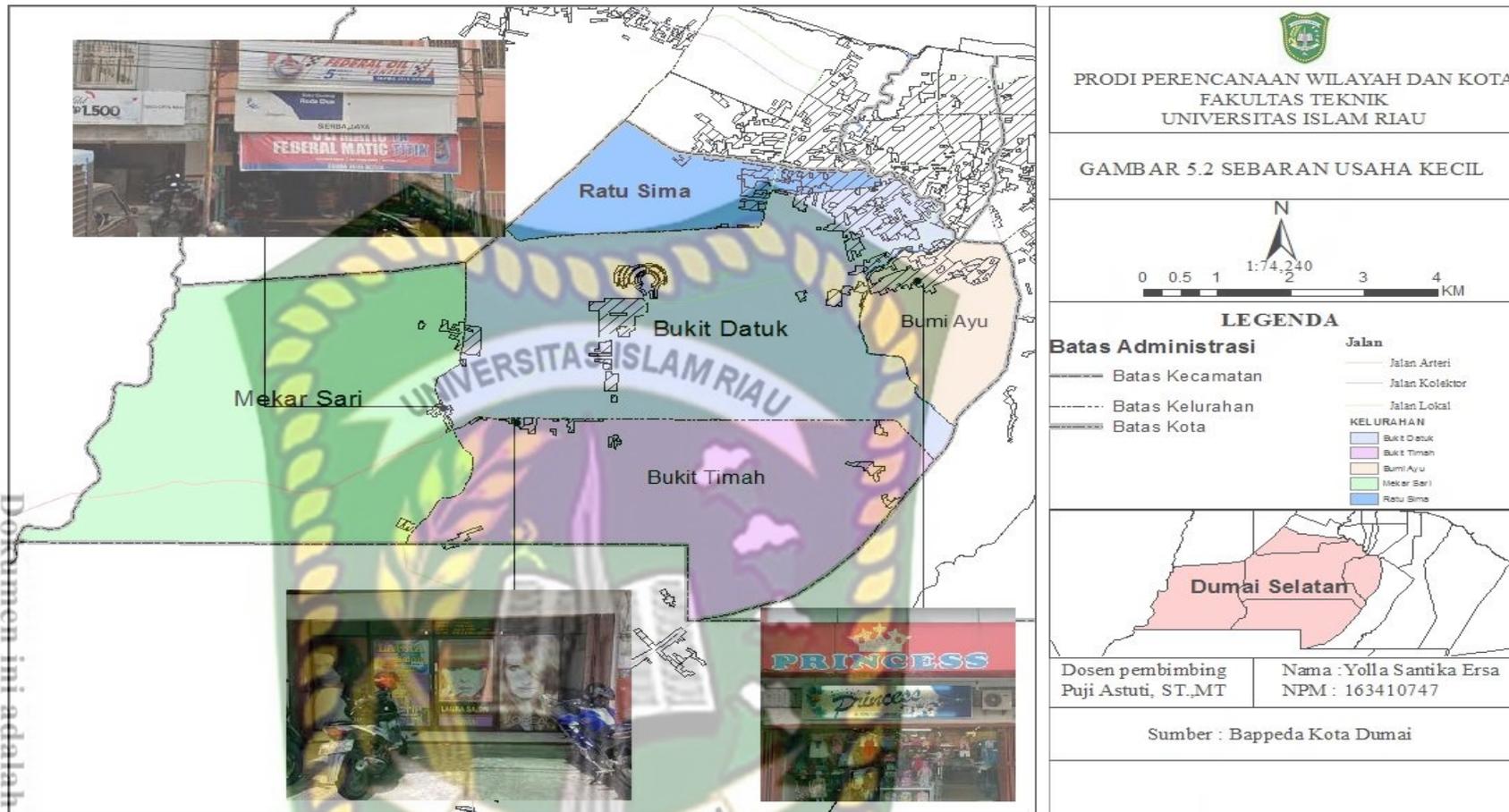
Usaha Kecil yang terdapat di Kecamatan Dumai Selatan yaitu sebanyak 22 UMKM seperti yang tertera pada tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8 Jumlah Usaha Kecil di Kecamatan Dumai Selatan

NO	USAHA KECIL	JUMLAH	PERSENTASE %
1	BUKIT DATUK	0	0
2	BUKIT TIMAH	11	50
3	RATU SIMA	0	0
4	BUMI AYU	1	5
5	MEKAR SARI	10	45
	TOTAL	22	100

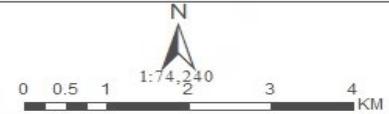
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa usaha Kecil yang berada di Kecamatan Dumai Selatan terdapat 22 usaha kecil dimana pada Kelurahan Bukit Timah memiliki usaha kecil paling banyak yaitu sebanyak 11 usaha dengan persentase 50%. Selain itu Kelurahan Bukit datuk memiliki 10 usaha kecil dengan persentase 45% dan di Kelurahan Bumi Ayu memiliki 1 Usaha kecil dengan persentase 5%. Namun pada Kelurahan Bukit Datuk dan Ratu Sima tidak memiliki usaha kecil.



PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

GAMBAR 5.2 SEBARAN USAHA KECIL



- LEGENDA**
- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
 - ... Batas Kelurahan
 - Batas Kota
- Jalan**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
- KELURAHAN**
- █ Bukit Datuk
 - █ Bukit Timah
 - █ Bumi Ayu
 - █ Mekar Sari
 - █ Ratu Sima



Dosen pembimbing
Puji Astuti, ST,MT

Nama : Yolla Santika Ersa
NPM : 163410747

Sumber : Bappeda Kota Dumai

Gambar 5.2 Sebaran Usaha Kecil
Sumber: Hasil Survey, 2022

5.1.3 Usaha Menengah

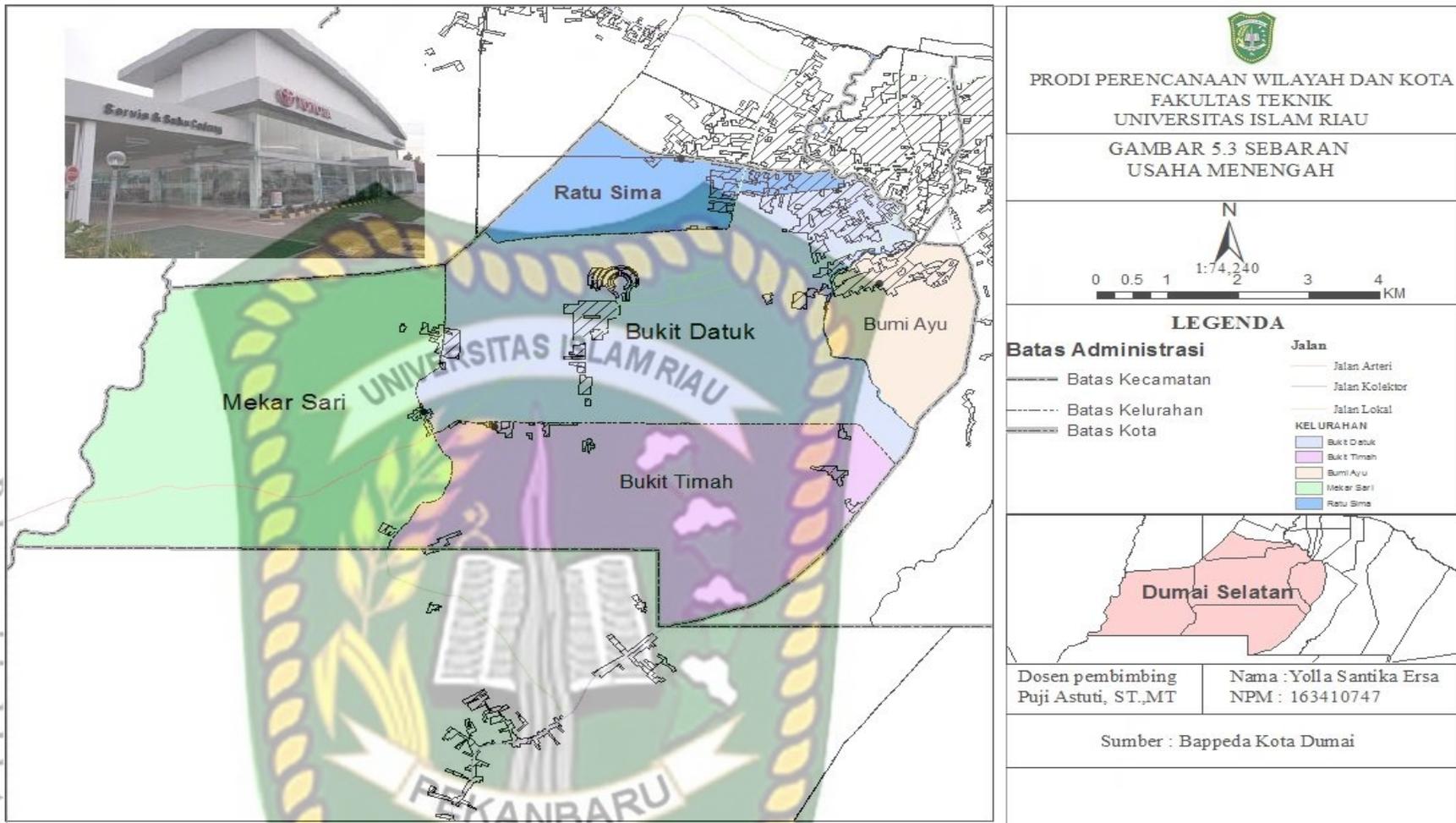
Usaha menengah yang terdapat di Kecamatan Dumai Selatan yaitu sebanyak 1 UMKM seperti yang tertera pada tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9 Jumlah Usaha Menengah di Kecamatan Dumai Selatan

NO	USAHA MENENGAH	JUMLAH	PERESENTASE %
1	BUKIT DATUK	0	0
2	BUKIT TIMAH	0	0
3	RATU SIMA	1	100
4	BUMI AYU	0	0
5	MEKAR SARI	0	0
	TOTAL	1	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.9 di atas dapat dilihat bahwa usaha Menengah yang ada di Kecamatan Dumai Selatan adalah usaha yang paling sedikit yaitu terdapat 1 usaha menengah dengan persentase 100% yang terdapat di Kelurahan Ratu Sima. Untuk Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Timah, Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Mekar Sari tidak memiliki usaha menengah.



Gambar 5.3 Sebaran Usaha Menengah

Sumber: Hasil Survey, 2022

5.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Dumai ibu Winda Yanti S.Sos, M.Si Kota Dumai memiliki berbagai macam usaha dimana Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penunjang ekonomi di Kota Dumai. Tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah Kota Dumai terhadap UMKM yang ada di Kota Dumai. Namun pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk memajukan UMKM Indonesia dimana telah terbitnya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP UMKM) dan 48 peraturan lainnya dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 16 februari 2021 lalu. PP UMKM mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Berdasarkan rencana program pemerintah yang disampaikan oleh bapak Walikota Dumai yaitu Bapak Paisal pada artikel Gatra yang dirilis tanggal 26 februari 2021 untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tumpuan menggairahkan ekonomi Kota Dumai. Adapun program pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai yaitu memberikan bantuan melalui program nasional BPUM (Bantuan Bagian Pelaku Usaha Mikro. Dengan adanya program ini pemerintah Kota Dumai mengharapkan mengembalikan gairah *entrepreneur* para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk

mengembangkan usaha yang digelutinya. Selain itu pemerintah juga memberikan pembekalan materi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai yang menjelaskan tata cara bagaimana para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa meningkatkan penjualan, mengembangkan usaha, hingga tips dan trik menarik konsumen di masa pandemik. Manfaat Bantuan Bagian Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sendiri dianggap sebagai program pemerintah yang dapat memberikan hasil positif untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usaha bagi pelakunya. Alasan pemerintah Kota Dumai melakukan program ini yaitu karena adanya jalan Tol Dumai-Pekanbaru yang tentunya mobilitas masyarakat meningkat, dan bisa menjadi modal untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, minimal untuk mendistribusikan produk.

Karena adanya program pemerintah untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat membuat perubahan terhadap UMKM yang ada di Kota Dumai dan adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru dapat membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membantu dalam kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Sehingga dapat membangkitkan dan memberikan pengaruh terhadap faktor ekonomi daerah Kota Dumai.

5.3 Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis, apakah ada pengaruh atau tidaknya pertimbangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS 16.0*.

5.3.1 Fungsi Pelayanan Kota

Variabel X1 atau fungsi pelayanan kota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan, dikarenakan jalan tol Dumai-Pekanbaru menghubungkan Kota Dumai dan Kota Pekanbaru dimana fungsi pelayanan kota Dumai dan Pekanbaru merupakan Pusat Kegiatan Nasional sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dalam distribusi barang ekspor dan import.

5.3.1.1 Kegiatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (X1.1)

Dalam penelitian ini kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor dalam melihat pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru dikarenakan karena adanya jalan tol Dumai-Pekanbaru dapat memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan seperti pengiriman bahan baku dan lainnya. Berikut tabel 5.8 hasil penelitian pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan pernyataan keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru

memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Dumai

Selatan:

Tabel 5.10 Penilaian Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekabaru Terhadap Kegiatan Pelaku UMKM

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	20	16,81
2	Setuju	29	24,37
3	Kurang Setuju	33	27,73
4	Tidak Setuju	23	19,33
5	Sangat Tidak Setuju	14	11,76
	Jumlah	119	100

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.10 tersebut dapat dilihat berdasarkan jawaban dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Dumai Selatan tentang keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru memudahkan kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selata yaitu kurang setuju menepati hasil yang paling banyak yaitu sebanyak 33 responden 27,73%, range kedua yaitu setuju yaitu sebanyak 29 responden dengan persentase 24,37%, range ketiga yaitu Tidak Setuju sebanyak 23 responden dengan 19,33%, range keempat yaitu sangat setuju sebanyak 20 responden dengan 16,81%, dan range terakhir yaitu sangat tidak setuju dengan responden sebanyak 14 dengan 11,76%.

5.3.1.2 Distribusi Barang (X1.2)

Dalam penelitian ini distribusi barang ditetapkan sebagai X1.2 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jalan Tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan distribusi barang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan untuk di kirimkan keluar kota. Berikut adalah tabel 5.9 hasil penilaian pelaku UMKM berdasarkan pernyataan keberadaan jalan Tol Dumai-Pekanbaru mempermudah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai untuk distribusi barang ke luar kota yaitu:

Tabel 5.11 Hasil Penilaian Pengaruh Jalan Tol Terhadap Distribusi Barang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	11	9,24
2	Setuju	4	3,36
3	Kurang Setuju	25	21,01
4	Tidak Setuju	54	45,38
5	Sangat Tidak Setuju	25	21,01
	Jumlah	119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.11 tersebut dapat dilihat jawaban dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang pernyataan keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru mempermudah untuk distribusi barang keluar kota bahwa *range* tertinggi pertama yaitu tidak setuju sebanyak 54 responden dengan 45,38%, *range* kedua dan ketiga mendapati hasil yang sama yaitu sangat tidak setuju dan kurang setuju sebanyak 25 responden dengan 21,01%, *range* keempat sangat setuju

sebanyak 11 responden dengan 9,24% dan *range* terendah yaitu setuju sebanyak 4 responden dengan 3,36%.

5.3.2 Panjang Jalan Tol (X2)

Panjang jalan tol merupakan salah satu aspek jalan tol yang menjadi faktor dalam melihat pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan. Berikut merupakan faktor yang dapat dipengaruhi oleh panjang jalan tol.

5.3.2.1 Waktu Tempuh (X2.1)

Dalam penelitian ini waktu tempuh ditetapkan sebagai variabel X2.1 merupakan salah satu faktor mempengaruhi Jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai di Kecamatan Dumai Selatan dikarenakan waktu tempuh merupakan hal yang menjadi faktor utama masyarakat luar kota untuk menggunakan jalan tol yang dimana pengguna jalan tol akan merasakan waktu yang akan ditempuh semakin singkat. Berikut adalah tabel 5.10 hasil penilaian pengguna jalan tol berdasarkan pernyataan pengunjung usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai bahwa panjang jalan tol Dumai-Pekanbaru mempersingkat waktu tempuh untuk pengguna jalan tol

Tabel 5.12 Hasil Penilaian Pengaruh Jalan Tol Terhadap Waktu Tempuh

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	33	27,73
2	Setuju	42	35,29
3	Kurang Setuju	21	17,65
4	Tidak Setuju	19	15,97
5	Sangat Tidak Setuju	4	3,36
	Jumlah	119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.12 tersebut berdasarkan pendapat dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai selatan tentang panajang jalan tol Dumai-Pekanbaru mempersingkat waktu tempuh untuk pengguna jalan tol dapat dilihat *range* tertinggi pertama yaitu setuju sebanyak 42 responden dengan 35,29%, *range* kedua yaitu sangat setuju sebanyak 33 responden dengan 27,73%, *range* ketiga yaitu kurang setuju dengan 21 responden sebanyak 17,65%, *range* keempat yaitu tidak setuju sebanyak 19 responden dengan 15,97%, dan *range* paling rendah yaitu sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan 3,36%.

5.3.2.2 Jumlah Pengunjung (X2.2)

Jumlah pengunjung merupakan salah satu faktor dalam melihat pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai terutama di Kecamatan Dumai Selatan ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengunjung yang menggunakan jalan tol ke Kota Dumai maka semakin besar juga kemungkinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai

selatan mendapatkan pengaruhnya. Berikut tabel 5.13 hasil dari pengunjung jalan tol yang datang ke UMKM di Kecamatan Dumai Selatan dengan pernyataan bahwa keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru meningkatkan jumlah pengunjung:

Tabel 5.13 Hasil Penilaian Pengaruh Jalan Tol Terhadap Jumlah Pengunjung

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	28	23,53
2	Setuju	44	36,97
3	Kurang Setuju	30	25,21
4	Tidak Setuju	14	11,76
5	Sangat Tidak Setuju	3	2,52
	Jumlah	119	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.13 tersebut dapat dilihat berdasarkan jawaban dari pernyataan mengenai keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru meningkatkan jumlah pengunjung dengan *range* tertinggi yaitu setuju sebanyak 44 responden dengan 36,97%, *range* kedua yaitu kurang setuju sebanyak 30 responden dengan 25,21%, *range* ketiga yaitu sangat setuju sebanyak 28 responden dengan 23,53%, *range* keempat yaitu tidak setuju sebanyak 14 responden dengan 11,75%, dan *range* kelima yaitu sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan 2,52.

5.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui besar pengaruh keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan analisis regresi berganda serta pengujian penelitian ini dilakukan dengan bantuan

komputerisasi SPSS. Adapun yang menjadi variabel data yang digunakan untuk menganalisa regresi linear berganda antara lain ; fungsi pelayanan kota (X1) dan Panajang Jalan Tol (X2).

Berikut merupakan tabel 5.12 hasil analisa regresi berganda

Tabel 5.14 Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.988	.541		5.521	.000
	X1.1	.106	.092	.108	1.149	.253
	X1.2	.075	.102	.069	.737	.462
	X2.1	-.038	.243	-.033	-.157	.876
	X2.2	-.058	.251	-.049	-.229	.819

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari tabel 5.14 dapat dibuat persamaan regresi linear berganda dibawah ini:

$$Y = a + b_1X_{1.1} + b_1X_{1.2} + b_2X_{2.1} + b_2X_{2.1}$$

$$Y = 2,988 + 0,106 X_{1.1} + 0,075X_{1.2} + (-0,038)X_{2.1} + (-0,054)X_{2.2}$$

Berdasarkan penjelasan dalam pengambilan keputusan uji t parsial (regresi linear berganda) berdasarkan nilai signifikansi. Menurut Imama Ghozali, 2011 dalam Yoghi Fernando jika nilai sig <0,05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Maka dilihat pada tabel 5.14.

1. Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel terikat berdasarkan hasil regresi linear berganda yang ada. Uji T dilakukan dengan membandingkan t hitung dari t tabel. Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima, dimana variabel bebas yang dimaksud mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka disimpulkan bahwa H0 diterima sedangkan H1 ditolak, dimana berarti variabel bebas yang di maksud tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

- 1) Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- 2) Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung, t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1) = t (0,025;114) = 1,981$$

Dapat dilihat hasil uji t pada tabel 5.13

Tabel 5.15 Tabel Hasil Uji T

No	Variabel	T hitung	Sig.	T tabel
1	Kegiatan Pelaku UMKM (X1.1)	1,149	0,253	1,981
2	Distribusi Barang (X1.2)	0,737	0,462	
3	Waktu Tempuh (X2.1)	-0,157	0,876	
4	Jumlah Pengunjung (X.2.2)	-0,229	0,819	

Sumber: Hasil Analisis,2022

Sesuai data dapat dijelaskan uji t dari variabel-variabel berikut:

1. Pengujian uji hipotesis koefisien regresi variabel kegiatan pelaku UMKM (X1.1)
Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1.1 terhadap Y adalah sebesar $0,253 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,149 < t$ tabel $1,981$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan X1.1 terhadap Y
2. Pengujian uji hipotesis koefisien regresi variabel distribusi barang (X1.2)
Diketahui nilai Sig, untuk pengaruh X1.2 terhadap Y adalah sebesar $0,462 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,737 < 1,981$ sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan X1.2 terhadap Y.
3. Pengujian uji hipotesis koefisien regresi variabel waktu tempuh (X2.1)
Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2.1 terhadap Y adalah sebesar $0,876 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,033 < 1,981$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti ada tidak ada pengaruh signifikan X2.1 terhadap Y
4. Pengujian uji hipotesis koefisien regresi variabel jumlah penumpang (X.2.1)
Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2.2 terhadap Y adalah sebesar $0,819 > 0,05$
Dan nilai t hitung $-0,229 < 1,981$ sehingga dapat disimpulkan H1 ditolah yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan X2.2 terhadap Y

2. Uji F

Uji kelayakan model atau lebih dikenal dengan sebagai uji F (uji simultan model) merupakan tahap awal mengidentifikasi model regersi yang diestimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 1) Jika nilai Sig < 0,05, atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai Sig. > 0,05, F hitung < F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

$$F \text{ tabel} = F (k ; n-k) = F (4 ; 114) = 2,45$$

Dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 5.16 Hasil Uji F

No	Variabel	F Hitung	Sig.	F Tabel
1	Kegiatan Pelaku UMKM (X1.1)	2,45	0,253	1,981
2	Distribusi Barang (X1.2)		0,452	
3	Waktu Tempuh (X2.1)		-0,876	
4	Jumlah Pengunjung (X.2.2)		-0,819	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil regresi dari tabel 5.14 menunjukkan F hitung sebesar 2,45 untuk F tabel yang diperoleh adalah 1,981 Dengan demikian F hitung > F tabel (2,45>1,981), maka dapat dikatakan model penelitian memenuhi atas kelayakan.

Maka dari regresi linear berganda ini terdapat variabel yang tidak berpengaruh. Untuk variabel yang tidak ada pengaruh yang signifikan yaitu kegiatan pelaku UMKM, distribusi barang, waktu tempuh dan jumlah pengunjung ini disebabkan hanya UMKM yang menjual oleh-oleh yang banyak mendistribusikan

barangnya ke luar kota seperti Kota Pekanbaru yang akan di jual di Kota Pekanbaru sementara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar lainnya hanya menjualkan di dalam Kota Dumai sehingga tidak ada kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan distribusi barang. Selain itu pada variabel waktu tempuh dan jumlah pengunjung tidak semua bertujuan untuk membeli hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adapun sebagian dari pengunjung yang memerlukan kecepatan waktu terhadap jalan tol yaitu guna pekerjaan dan kegiatan lainnya.



Tabel 5.17 Rekapitulasi Hasil Regresi Pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengaruh	Variabel		Nilai B	Keterangan
Positif	X1.1	Kegiatan pelaku UMKM	0,106	Jalan tol memudahkan kegiatan pelaku UMKM melakukan aktivitas keluar kota
	X1.2	Distribusi Barang	-0,75	Adanya penjualan di Kota Pekanbaru distribusi barang dapat menjadi lebih mudah karena adanya jalan tol
Negatif	X2.1	Waktu Tempuh	-0,033	Waktu tempuh yang singkat membuat masyarakat dan pelaku UMKM dimudahkan karena adanya jalan tol
	X2.2	Jumlah Pengunjung	-0,017	Jumlah pengunjung menjadi meningkat karena adanya jalan tol namun tidak semua pengunjung yang datang ke Dumai membeli jualan UMKM

Sumber: Hasil Analisis 2022

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diambil kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan hasil dari karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Dumai Selatan terdapat 170 UMKM yang tersebar di 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Selatan dengan 9 sektor usaha. Dimana terdapat 147 usaha mikro, 22 usaha kecil dan 1 usaha menengah. Dan memiliki sektor usaha paling banyak pada sektor usaha olahan makanan/minuman sebanyak 92 UMKM dengan persentase 54%, lalu yang kedua yaitu pada sektor perdagangan sebanyak 55 UMKM dengan persentase 32%, ketiga yaitu jasa sebanyak 17 UMKM dengan persentase 10% dan yang terakhir inovatif dan kreatif sebanyak 3 UMKM dan Konveksi masing-masing sebanyak 3 UMKM dengan persentase 2%.
2. Berdasarkan kebijakan pemerintah Kota Dumai terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kota Dumai tidak memiliki kebijakan khusus bagi UMKM pemerintah Kota Dumai hanya mengikuti aturan dari pemerintah pusat tentang UMKM dimana aturan yang terdapat yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha. Namun pemerintah akan melakukan kegiatan yaitu BPUM (Bantuan Bagi

Pelaku Usaha Mikro) untuk para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang digelutinya.

3. Berdasarkan hasil identifikasi pengaruh Jalan Tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh berdasarkan fungsi kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap keberadaan jalan tol Dumai-Pekanbaru, distribusi barang, waktu yang ditempuh dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pendapatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka berikut adalah saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu

1. Dapat meningkatkan promosi hingga keluar Kota Dumai sehingga masyarakat dari luar daerah dapat tau dan mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan
2. Dengan adanya jalan tol ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan jalan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik tentang pengaruh jalan tol Dumai-Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dumai Selatan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak variabel dan upaya

dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota
Dumai



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Am, Sanusi, and Ansar Ansar. "Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa." *Jurnal Ekonomi Balance* 11.1 (2015): 27-31.
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2021
- Badan, Pengatur Jalan Tol. 2021. Tujuan dan Manfaat Jalan Tol. <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat> (diakses tanggal 13 november 2021)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya: An-Nisa*;29
- Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Dumai Tahun 2020
- Fahrul, Rizal. 2020. Pengaruh Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Pendapatan UMKM di Sekitar Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. *Skripsi*, Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-raniry
- Fakhurozi, Ahmad, Agustina Dewi Ningrum, and Rizki Amanda. "Kajian Studi Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Jtts) Terhadap Infrastruktur Dan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 4.1 (2020): 14-29.
- Farnita, Riska. 2016. Analisa Pengangguran Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah. Vol 1, 2016, ISSN 2541-657X

- Fernando, Yoghi. 2020. Dampak PT. Pelindo I Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota. *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Halim, Abdul. "Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju." *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1.2 (2020): 157-172.
- Hasan, Muhammad, dan Muhammad Azis. "Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal." (2018).
- Huda, Ali. 2010. Analisis Perubahan Pergerakan Akibat Perubahan Infrastruktur Jalan Lokal Sebagai Dampak Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, *Skripsi*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hutama Karya. 2020. Jalan Tol Trans Sumatera. <https://hutamakarya.com/old/production/public/segera-dioperasikan-tol-pekanbaru-dumai-masuki-tahap-evaluasi-uji-laik-fungsi-ulf> (diakses tanggal 13 november 2021
Kecamatan Dumai Selatan Dalam Angka Tahun 2021
- Ma'rifah, A.N. 2018. Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Akibat Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. *Skripsi*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau

- Manullang, Januardin, and Hottua Samosir. "Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* 3.1 (2019): 45-54.
- Miraza, Bachtiar Hassan. "Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah." *Wahana Hijau: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Sekolah Pascasarjana*. Medan: Universitas Sumatera Utara 1.2 (2005): 45-49.
- Nuraini, Mutiara. 2019. Analisis Faktor-Faktor penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Bandar Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Ortega, Alejandro, José Manuel Vassallo, and Juan Ignacio Pérez. "Modelling some equality and social welfare impacts of road tolling under conditions of traffic uncertainty." *Research in Transportation Economics* 88 (2021): 101110.
- Permanawati, Raden Ratna, and Aneu Yulianeu. "Sistem Pakar Untuk Menentukan Suatu Peluang Usaha Dengan Menggunakan Metode Smarter dan Oreste." *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)* 1.1 (2018).
- Phenyo. M dan Osden. J. 2021. Evaluating The Benefits Of Cloud Computing in Small, Medium And Micro-Sized Enterprises (SMMEs). *Jurnal of Computer Science*, 181, 784-792.
- Prasetyo, Septian Andi, and Ahmad Djunaedi. "Perubahan perkembangan wilayah sebelum dan sesudah pembangunan jalan tol." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 3.1 (2019): 14-14.

- Putra, Adnan Husada. "Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5.2 (2016).
- Putra, Nabila Cahaya. Dampak Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Diss. Universitas Brawijaya, 2018.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Revayanti, Ina. "Dampak Pembangunan Jalan Tol Bocimi Terhadap Sosial, Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sukabumi." *GEOPLANART* 2.2 (2020): 75-88.
- Rifaâ, Irsyad Muhammad, Firsta Rekayasa Hernovianty, and Nana Novita Pratiwi. "Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Umkm Di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang." *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura* 6.2.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Taufiq. 2016. Etika Perdagangan Dalam Al-Quran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Lhokseumawe: IAIN. 3.1 (2016)

Yusuf, M. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.

Jakarta: Prenada Media." *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*

(2017).

